

**DINAMIKA SOSIAL MINORITAS MUSLIM TIBET DALAM
KONFLIK DIPLOMATIK TIONGKOK-INDIA (1959-1980)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Sejarah
Peradaban Islam (S. Hum)**

**Oleh
HASNAWATI
NIM. 2017503058**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
JURUSAN STUDI AL-QUR'AN DAN SEJARAH
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Hasnawati
NIM : 2017503058
Jenjang : S-1
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Jurusan : Studi Al-Qur'an dan Sejarah
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Dinamika Sosial Minoritas Muslim Tibet Dalam Konflik Diplomatik Tiongkok-India (1959-1980)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari bukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,



Hasnawati
NIM. 2017503058



PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**Dinamika Sosial Minoritas Muslim Tibet Dalam Konflik Diplomatik
Tiongkok-India (1959-1980)**

Yang disusun oleh Hasnawati (NIM 2017503058) Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 12 November 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Humaniora (S. Hum)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

Sidik Fauji, M.Hum.
NIP. 199201242018011002

Penguji II

Rahman Latif Alfian, S.Pd., M.Ant.
NIP. 199109272020121005

Ketua Sidang/Pembimbing

Fitri Sari Setvorini M.Hum.
NIP. 198907032023212036

Purwokerto, 26 November 2024

Dekan



Dr. Hartono, M.Si.
NIP. 197205012005011004



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Oktober 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Hasnawati

Lamp :

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Hasnawati

NIM : 2017503058

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Jurusan : Studi Al-Qur'an dan Sejarah

Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Judul : Dinamika Sosial Minoritas Muslim Tibet Dalam Konflik Diplomatik Tiongkok-India (1959-1980)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Humaniora (S.Hum).

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Fitri Sari Setyorini, M.Hum.
NIP. 198907032023212036

DINAMIKA SOSIAL MINORITAS MUSLIM TIBET DALAM KONFLIK DIPLOMATIK TIONGKOK-INDIA (1959-1980)

Hasnawati
2017503058

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. A. Yani 40-A (+62281)635624 Purwokerto 53126
Email : khs0103@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah dan perkembangan muslim Tibet dan dampak konflik diplomatik Tiongkok India terhadap dinamika sosial muslim Tibet. Penelitian ini menggunakan penelitian studi literatur dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Untuk menganalisis dampak dari konflik Tiongkok-India terhadap dinamika sosial muslim Tibet, peneliti menggunakan teori kekuasaan Max Weber serta menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini difokuskan pada sejarah dan perkembangan muslim Tibet, terjadinya Insiden 1959 di Lhasa serta konflik diplomatik Tiongkok-India mengenai kewarganegaraan muslim Tibet yang berdampak terhadap dinamika sosial muslim Tibet. Hasil dari penelitian ini yakni sejarah masuknya Islam di Tibet dan perkembangan muslim Tibet sebagai minoritas muslim yang tinggal di Tibet dari abad ke 17 di bawah pemerintahan Dalai Lama ke-5, jatuhnya Tibet ditangan Tiongkok pada tahun 1950 menimbulkan keresahan masyarakat Tibet menyebabkan terjadinya insiden 1959 antara tentara Tiongkok dengan masyarakat Tibet. Akibat dari insiden tersebut muslim Tibet yang merasa terancam akan identitas agama mereka kemudian mendatangi kedutaan besar India di Lhasa. Pemerintah India masuk dan mengklaim muslim Tibet sebagai bagian dari India sehingga menimbulkan konflik diplomatik antara Tiongkok-India mengenai kewarganegaraan muslim Tibet. Dampak dari konflik tersebut membuat muslim Tibet akhirnya bermigrasi ke Kasmir, India agar terhindar dari pemerintahan Tiongkok di Tibet.

Kata Kunci : Muslim Tibet, Konflik Tiongkok-India, Minoritas Muslim

DINAMIKA SOSIAL MINORITAS MUSLIM TIBET DALAM KONFLIK DIPLOMATIK TIONGKOK-INDIA (1959-1980)

Hasnawati
2017503058

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. A. Yani 40-A (+62281)635624 Purwokerto 53126
Email : khs0103@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the history and development of Tibetan Muslims and the impact of China-India diplomatic conflict on the social dynamics of Tibetan Muslims. This study uses literature study research using historical research methods. To analyze the impact of the Sino-Indian conflict on the social dynamics of Tibetan Muslims, the researcher used Max Weber's theory of power as well as using historical approaches and sociological approaches. The research focused on the history and development of Tibetan Muslims, the 1959 Lhasa incident and the Sino-Indian diplomatic conflict over Tibetan muslim citizenship that affected the social dynamics of Tibetan Muslims. The result of this research is the history of the entry of Islam in Tibet and the development of Tibetan Muslims as a Muslim minority living in Tibet from the 17th century under the rule of the 5th Dalai Lama, the fall of Tibet in the hands of China in 1950 caused unrest among Tibetans led to the 1959 incident between the Chinese army and the Tibetan people. As a result of the incident Tibetan Muslims who feel threatened about their religious identity then went to the Indian Embassy in Lhasa. The Indian government came in and claimed Tibetan Muslims as part of India thus creating a Sino-Indian diplomatic conflict over the citizenship of Tibetan Muslims. The impact of the conflict made Tibetan Muslims eventually migrate to Kashmir, India to avoid Chinese rule in Tibet.

Keywords: Tibetan Muslims, China-India Conflict, Muslim Minority

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـُ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haua*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إِ...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

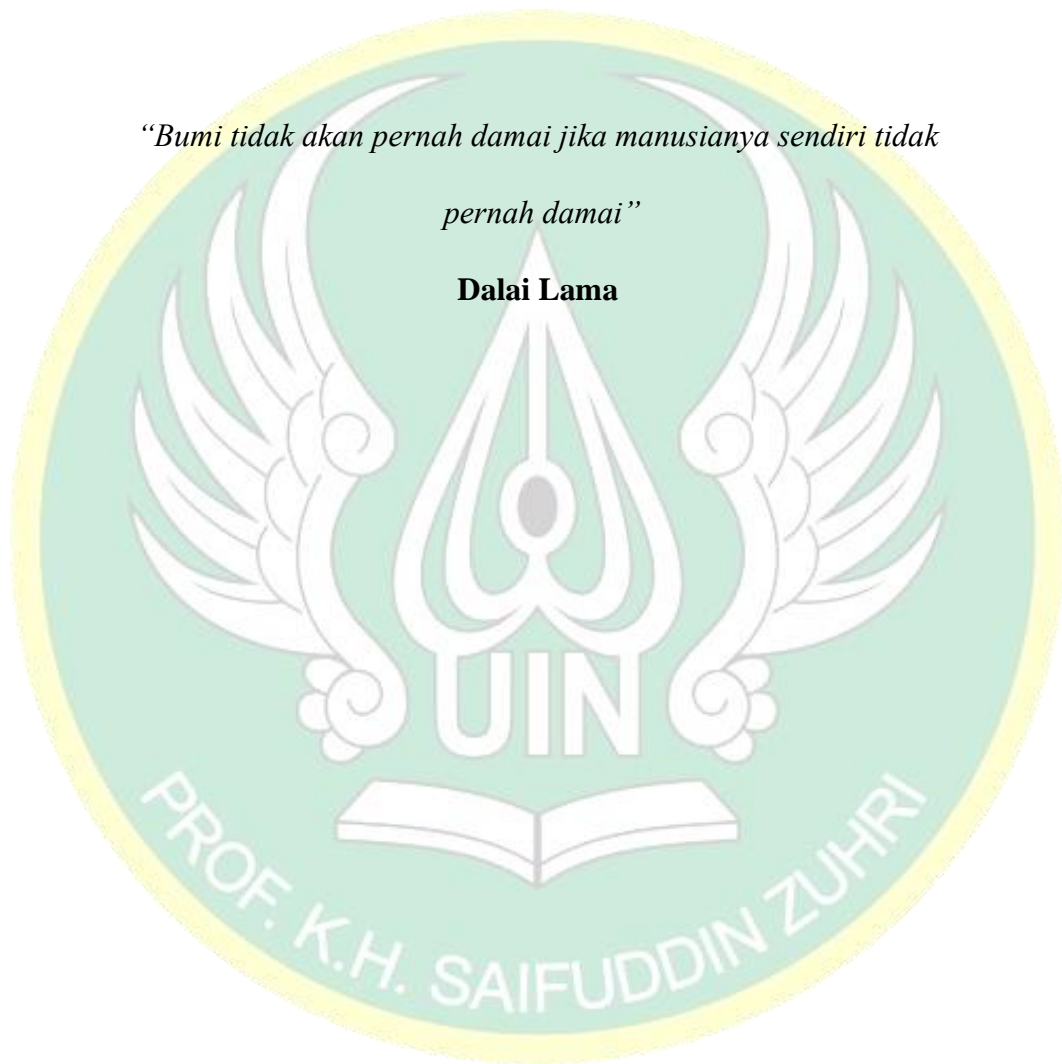
MOTTO

“Apapun agama yang kita yakini hendaknya kita baik dan penuh kasih kepada semua makhluk hidup”

Dalai Lama

“Bumi tidak akan pernah damai jika manusianya sendiri tidak pernah damai”

Dalai Lama



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta hidayah-Nya hingga diberikannya nikmat sehat dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan suatu apapun.

Adapun skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta peneliti, Bapak Ahmad Saeful dan Ibu Sumiati. Dua orang terhebat dalam hidup peneliti yang senantiasa memberi kasih sayangnya, dukungan, dan selalu mendoakan peneliti agar menjadi orang yang berhasil. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, motivasi, dan semangat untuk peneliti.
2. Kakak tercinta Ali Munir dan Khoirul Bariyah yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
3. Adik tercinta Istiqomah yang selalu menjadi pendukung, penyemangat, dan penghibur yang sangat peneliti sayangi.
4. Sepupu dan keponakan tercinta Egi Purnairawan, Fika Faizah, Mafaza Yuna Arasti dan Muhammad Rizki Nazar Ali.
5. Keluarga besar Almarhum Mbah Sunarto tercinta yang selalu mendukung peneliti untuk menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan ini.
6. Abah Mukti beserta keluarga ndalem Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuaran dengan ridho dan doa untuk murid-muridnya yang peneliti harapkan barokah ilmunya.

7. Sahabat seperjuangan Ulul Fatwa Zaharoh, Defi Safitri, Priska Thalia Putri, Munazah Uji Rinastri, Ana Fauzia Sarafina, Umi Zahro atas dukungan dan semangat dari mereka kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman kamar 6 Septiyani Puji Lestari, Fujiatun Nur Istiqomah, dan Dewi Aisyah yang selalu memberi semangat dan menjadi saksi bisu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman SPI B angkatan 2020 yang telah bersama-sama selama melewati proses perkuliahan. Terimakasih atas kebersamaannya dan semoga kita semua menjadi orang-orang sukses di masa depan.
10. Teman-teman KKN UIN SAIZU Purwokerto angkatan 52 kelompok 60, terimakasih atas kebersamaannya selama 40 hari. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin dengan baik.
11. Terimakasih juga untuk semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Segala puji syukur peneliti haturkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Dinamika Sosial Minoritas Muslim Tibet Dalam Konflik Diplomatik Tiongkok-India (1959-1980)”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.

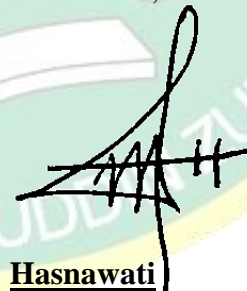
Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Hartono, M. Si., selaku Dekan, Bapak Prof. Kholid Mawardi, S. Ag. M. Hum., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Farichatul Maftuchah, M. Ag., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Elya Munfarida M. Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. Ibu Farah Nuril Izza, Lc. M. A., selaku Ketua Jurusan Studi Al-Qur'an dan Sejarah dan Bapak Nurrohim, Lc. M. Hum., selaku Kepala Program Studi Sejarah Peradaban Islam.

4. Ibu Fitri Sari Setyorini, M. Hum., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi peneliti. Terimakasih atas arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora.
6. Kedua orang tua dan keluarga besar atas doa dan dukungannya selama ini.
7. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuaran yang telah memberikan tempat untuk menimba ilmu.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang bisa diucapkan selain terimakasih kepada semua pihak yang bersangkutan. Semoga amal baiknya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT dan dicatat serta diterima oleh Allah SWT. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan respon positif bagi pembaca dan dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

Purwokerto, 24 Oktober 2024

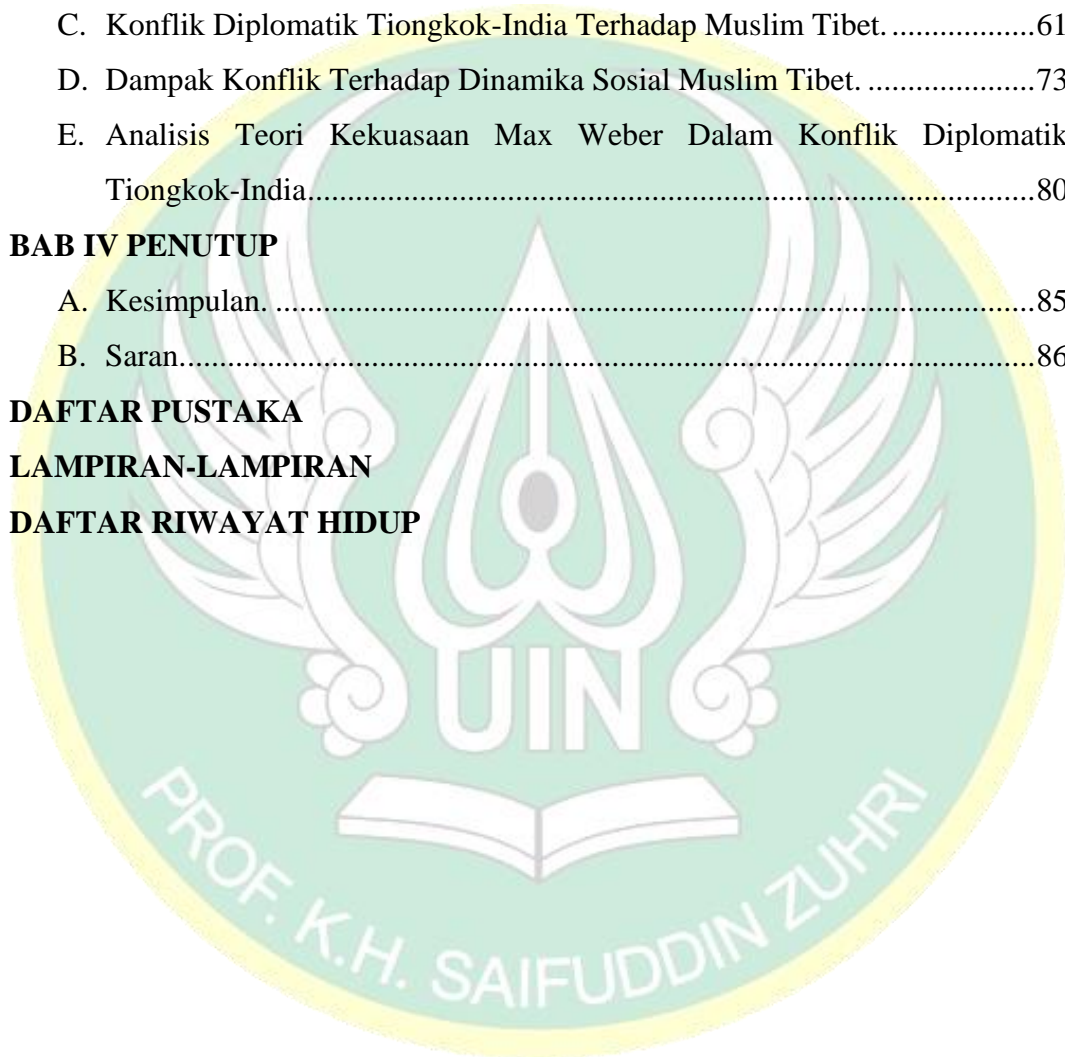


Hasnawati
NIM. 2017503058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Landasan Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MINORITAS MUSLIM TIBET	
A. Sejarah Masuknya Islam di Tibet.....	21
B. Perkembangan Minoritas Muslim Tibet.....	31
1. Minoritas Muslim Tibet “Khache”.....	31

2. Dinamika Minoritas Muslim Tibet.	38
BAB III DAMPAK KONFLIK DIPLOMATIK TIONGKOK-INDIA TERHADAP DINAMIKA SOSIAL MINORITAS MUSLIM TIBET (1959- 1980)	
A. Konflik Tiongkok-Tibet.	47
B. Insiden 1959.	51
C. Konflik Diplomatik Tiongkok-India Terhadap Muslim Tibet.	61
D. Dampak Konflik Terhadap Dinamika Sosial Muslim Tibet.	73
E. Analisis Teori Kekuasaan Max Weber Dalam Konflik Diplomatik Tiongkok-India.	80
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.	85
B. Saran.	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta wilayah utama (provinsi) Tibet..	22
Gambar 2 Masjid Agung Lhasa	38
Gambar 3 Peta Tibet dengan pembagian wilayah tinggal umat Islam dan Buddha	40
Gambar 4 Penandatanganan perjanjian 17 poin antara delegasi Tibet dan Tiongkok.....	50
Gambar 5 Para perempuan Tibet mengikuti pemberontakan tahun 1959.....	55
Gambar 6 Muslim Tibet berpergian haji pertama dari Lhasa-Bombay-Jeddah setelah pendudukan Tiongkok tahun 1959.....	67



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Dalai Lama	25
-----------	-------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN

AS : Amerika Serikat

RRT : Republik Rakyat Tiongkok

PLA : Pembebasan Rakyat Tiongkok

KM : Kilometer

km² : Kilometer Persegi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Peta Provinsi Tibet dan Tempat Tinggal Masyarakat Muslim serta Buddha di Tibet

Lampiran 2: Peta Wilayah Tibet

Lampiran 3: Tabel Daftar Dalai Lama

Lampiran 4: Bagan Komunitas Muslim Khache dan Timeline Peristiwa Sejarah Islam Tibet

Lampiran 5: Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 6: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 7: Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan

Lampiran 8: Balngko Bimbingan Skripsi

Lampiran 9: Surat Rekomendasi Munaqosyah

Lampiran 10: Surat Keterangan Cek Plagiasi

Lampiran 11: Sertifikat

- a. Sertifikat BTA/PPI
- b. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- c. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- d. Sertifikat PPL
- e. Sertifikat KKN

Lampiran 12: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam masuk di Tibet dibawa oleh para pedagang atau imigran muslim yang berasal dari wilayah Kashmir, Ladakh, Tiongkok, dan Nepal (Sheikh, 1991). Selain melalui para pedagang atau imigran muslim, bukti pertama pengaruh Islam di Tibet dapat ditelusuri hingga abad ke-7 ketika kekhalifahan Abbasiyah menguasai Bagdad dan kekaisaran Tibet membuat orang Tibet dikenal oleh para penulis muslim dengan menyebut Tibet atau Tubbat dalam teks mereka (Gaute, 2015). Pada abad ke-15, warga Kashmir menjadi penduduk muslim pertama di Tibet Tengah. Namun hingga akhir abad ke-16 dalam menelusuri komunitas muslim, hanya sedikit umat Islam yang tinggal permanen di Tibet (Atwill, 2018). Barulah pada abad ke-17, umat Islam mulai tinggal di Lhasa atas persetujuan Dalai Lama kelima (Barq, 2013).

Wilayah Tibet terletak di dataran tinggi Himalaya yang dihuni oleh sebagian etnis Tibet dengan mayoritas masyarakatnya beragama Buddha dan dipimpin oleh seorang Bisku Buddha yaitu Dalai Lama (Yola et al., 2021). Minoritas agama lain yang ada di Tibet yaitu Bon dan Islam. Minoritas muslim di Tibet terbentuk setelah adanya arus imigran dari pedagang muslim dari berbagai daerah yang kemudian menetap di wilayah Tibet. Para pedagang muslim kemudian menikah dengan wanita asli Tibet yang sebagian besar merupakan non muslim yang pindah menjadi muslim

mengikuti agama suaminya, memiliki anak dan menetap di Tibet. Imigran muslim dan muslim *muallaf* di Tibet menyatu bersama membentuk suatu minoritas muslim yang beradaptasi dengan baik dengan budaya setempat namun tetap sesuai dengan syariat agama Islam (Kettani, 2005).

Muslim Tibet disebut dengan muslim Khache, keberadaan Khache di wilayah Tibet terdapat beberapa tanggapan dalam memahami apakah mereka memang berasal dari penduduk asli Tibet atau komunitas muslim pendatang dari Khasmir. Namun di Tibet, Khache merupakan sebutan atau istilah khusus yang disematkan oleh orang Tibet untuk menunjukkan seorang muslim Tibet yang tinggal di sana. Sebagian besar Khache tinggal pusat kota besar seperti di Lhasa, Shigatse, Lhartse, dan Tsetang. Pada tahun 1950, sekitar 10% dari 30.000 penduduk awam di Lhasa adalah muslim (Atwill, 2018).

Pada masa pemerintahan Dalai Lama kelima, muslim Tibet mendapatkan kebebasan menjalankan agamanya dan diberi status khusus (Siddiqui, 1991). Meskipun muslim Tibet tidak diperbolehkan untuk mendakwahkan agama, namun muslim Tibet bebas berdagang, membuka toko dan membentuk sebuah komite bahkan bahkan diperbolehkan memakan daging sapi pada saat festival doa besar di awal bulan Lunar sedang dilakukan oleh umat Buddha. Mereka juga diperbolehkan mendirikan masjid dan sekolah tanpa ada larangan dari pemerintah Tibet.

Berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949 di bawah kekuasaan Partai Komunis Tiongkok dengan pemimpinnya yaitu Mao Zedong mulai melakukan invasi ke wilayah Tibet. Secara historis, Tiongkok tidak hanya sekali melakukan invasi ke wilayah Tibet dan berusaha menjalankan pemerintahan langsung di sana. Terjadinya invasi pada tahun 1950, menandakan keberhasilan Tiongkok dalam menduduki wilayah Tibet pada saat itu dipimpin oleh Dalai Lama ke-14. Salah satu perlawanan terbesar dari masyarakat Tibet terjadi setelah masuknya Tiongkok di Tibet terutama di wilayah Lhasa, ibukota Tibet pada tahun 1959 (Aiqani, 2018).

Pergolakan antara Tiongkok dengan masyarakat Tibet dimulai pada tanggal 10 Maret 1959 kemudian berlanjut dengan kedatangan tentara Tiongkok atas perintah Mao pada 12 Maret 1959 ke wilayah Tibet diawali dengan pengepungan tempat ibadah umat Buddha di biara Drepung dan biara Sera yang kemudian menimbulkan pemberontakan antara keduanya (Siddiqui, 1991). Masyarakat Tibet yang panik kemudian bergegas menyelamatkan Dalai Lama ke-14 dan ibukota Lhasa dari serangan tentara Tiongkok. Walaupun jumlah masyarakat Tibet banyak, akan tetapi mereka tidak terlatih berperang dan tidak bersenjata sehingga tidak bisa menghalau serangan tentara Tiongkok. Akibat terdesak oleh keadaan yang semakin tidak terkendali di Lhasa, *Kashag* (dewan pemerintah Tibet) akhirnya memutuskan agar Dalai Lama ke-14 pergi

meninggalkan Tibet untuk mengungsi ke wilayah perbatasan Tibet-India sementara waktu hingga pergolakan di Tibet meredam.

Kepergian Dalai Lama ke-14 yang kemudian diketahui oleh Tiongkok dan masyarakat Tibet, tidak memutus rantai pergolakan yang sedang terjadi akan tetapi mengakibatkan pergolakan semakin sengit terutama mengenai perebutan dan penguasaan wilayah Tibet (Atwill, 2018). Sebagai bagian dari masyarakat Tibet, muslim Tibet juga ikut terdampak dalam pemberontakan tersebut, terutama mereka yang mendukung Dalai Lama ke-14 kemudian memutuskan untuk ikut meninggalkan Tibet dan pergi ke Khasmir, India. Kepergian umat Islam ke India tidak serta merta karena mengikuti Dalai Lama ke-14 sebagai seorang yang mereka hormati. Namun muslim Tibet menyadari apabila mereka masih bertahan di bawah pemerintahan Tiongkok, maka mereka akan kehilangan generasi penerus, kebebasan beragama dan hidup terkekang. Kehidupan mereka tidak akan sama lagi saat masih di bawah pemerintahan Dalai Lama ke-14 sehingga membuat mereka memikirkan kembali identitas kewarganegaraan mereka (Siddiqui, 1991).

Setelah pemberontakan di Tibet berhasil dipadamkan, muslim Tibet kemudian mengirim delegasi ke kedutaan besar India di Lhasa dan menyatakan bahwa mereka adalah orang Khasmir dan berhak atas kewarganegaraan India. Pemerintah India yang setuju kemudian masuk dan mengklaim muslim Tibet sebagai warga negara India terutama setelah melihat perlakuan Tiongkok terhadap muslim Tibet. Pemerintah India

memberikan bantuan kepada muslim Tibet dengan memberikan formulir permohonan kewarganegaraan India yang didistribusikan oleh Konsulat Jenderal India yang berada di Lhasa. Pemerintah Tiongkok yang tidak terima, merasa tindakan pemerintah India sebagai tindakan yang paling tidak ramah dan terkesan ikut campur. Karena masalah tersebut, menimbulkan pertikaian diplomatik antara Tiongkok-India mengenai kewarganegaraan muslim Tibet. Hingga pada akhir tahun 1959, keputusan muslim Tibet memilih untuk memasuki India dengan alasan utama karena merasa Kashmir merupakan rumah nenek moyang mereka dan juga pemerintah India menjanjikan akan memberi status kewarganegaraan untuk mereka.

Dari sejarah perkembangan umat Islam di Tibet dan masuknya pemerintah Tiongkok di Tibet yang bertujuan untuk menguasai wilayah dan menjadikan Tibet sebagai daerah otonomi Tiongkok menimbulkan konflik antara masyarakat Tibet, Tiongkok bahkan pemerintah India merupakan masalah yang menarik untuk diteliti. Mengingat Tibet merupakan wilayah yang memiliki daya tarik komersial, masyarakatnya yang taat beribadah serta kerukunan agama yang terjalin erat antara umat Buddha dan Islam. Penelitian ini sangat penting untuk diteliti terutama untuk menggali informasi mengenai sejarah perkembangan umat Islam di Tibet dan konflik diplomatik Tiongkok-India.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian sejarah memerlukan adanya batasan untuk lebih memfokuskan arah dari penelitian yang akan diteliti supaya penelitian tidak terlalu luas dan tidak membutuhkan banyak data yang tidak diperlukan. Pembatasan ini memungkinkan penulis untuk lebih mendalam memetakan isi dari penelitian yang akan ditulis. Dalam menentukan batasan suatu penelitian bisa dilihat dari berbagai sisi seperti tempat dan waktu (Abdurrahman, 2011).

Maka dari itu batasan tempat atau wilayah dalam penelitian ini difokuskan pada wilayah Tibet sebagai tempat tinggal muslim Tibet sampai terjadinya Insiden 1959 antara Tiongkok-Tibet dan juga wilayah Khasmir, India setelah migrasi muslim Tibet akibat Insiden 1959. Selain itu, pembatasan waktu ini difokuskan pada sejarah perkembangan muslim di Tibet dan dinamika sosial muslim Tibet dalam konflik diplomatik Tiongkok-India.

Penelitian ini mengambil latar waktu tahun 1959-1980 karena pada masa itu Tiongkok sudah menguasai Tibet. Dari rentang waktu 1959 pemerintah Tiongkok sudah berhasil menduduki ibukota Tibet hingga terjadi pemberontakan antara masyarakat Tibet dengan tentara Tiongkok yang menyebabkan muslim Tibet memilih pergi untuk mendapatkan perlindungan dan status kewarganegaraan di wilayah lain, salah satunya yaitu negara India. Kemudian ditengah pergolakan Tiongkok-Tibet yang belum padam, terjadi konflik diplomatik antara Tiongkok dengan India

terjadi dengan permasalahannya mengenai klaim kewarganegaraan muslim Tibet oleh pemerintah India terutama setelah terjadinya pemberontakan Tibet pada tahun 1959 di Lhasa, ibukota Tibet yang membuat Tiongkok merasa India ikut campur dalam permasalahan Tiongkok-Tibet. Tahun 1980, muslim Tibet yang sudah berada di pengungsian Idd Gah wilayah Khasmir, India. Komunitas muslim Tibet yang hidup di pengungsian membentuk asosiasi kesejahteraan namun mereka mendapat masalah administratif sehingga urusan komunitas muslim yang telah mereka jalankan harus terpecah menjadi dua pusat karena perbedaan wilayah tempat tinggal mereka saat itu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan minoritas muslim Tibet?
2. Bagaimana dampak konflik diplomatik Tiongkok-India terhadap dinamika sosial minoritas muslim Tibet (1959-1980)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian selain mengenai rumusan masalah perlu adanya tindak lanjut dalam memecahkan masalah yang akan diteliti. Maka dari itu, tujuan dari masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sejarah dan perkembangan minoritas muslim Tibet.
2. Untuk mendeskripsikan dampak konflik diplomatik Tiongkok-India terhadap dinamika sosial minoritas muslim Tibet (1959-1980)

Selain tujuan, penelitian ini juga perlu memiliki manfaat yaitu:

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam pembelajaran sejarah Islam terutama mengenai perkembangan minoritas muslim Tibet dan menjadi referensi untuk penelitian yang serupa serta dapat menambah bahan bacaan yang ada di Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan serta sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Manfaat lain hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membantu masyarakat umum memahami tentang minoritas muslim Tibet. Penelitian ini juga bisa menjadi sumber bagi suatu pemerintahan dalam memberlakukan minoritas muslim di wilayah mereka.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut Dudung Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Sejarah Islam”, tinjauan pustaka merupakan uraian tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat literatur yang digunakan oleh penulis yang di dalamnya membahas tentang Dinamika Sosial Minoritas Muslim Tibet Dalam Konflik Diplomatik Tiongkok-India (1959-1980).

Pertama, jurnal dari Nilma Yola berjudul "Minoritas Muslim Tibet di Tengah Komunitas Budha". Jurnal ini diterbitkan oleh Turasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 9 No. 1 Tahun 2021. Sebuah jurnal yang di dalamnya membahas mengenai sejarah kehidupan minoritas muslim di wilayah Tibet yang hidup di tengah-tengah masyarakat penganut Buddha. Mereka hidup damai dan bersama-sama melawan tentara Tiongkok untuk mempertahankan wilayah Tibet. Kesamaan dari penelitian ini terdapat pada pembahasan mengenai perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat Tibet juga kepada minoritas Muslim Tibet. Perbedaannya, pada jurnal ini berfokus pada alasan mengenai minoritas muslim dan mayoritas penganut agama Buddha bisa hidup damai dan berdampingan di wilayah Tibet. Penelitian ini berfokus pada sikap pemerintah Tiongkok dalam membatasi kebebasan beragama muslim Tibet.

Kedua, jurnal dari Attaullah Siddiqui berjudul "Muslims Of Tibet". Jurnal ini diterbitkan oleh The Tibetan Journal Vol. 16, No. 4 tahun 1991. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai asal usul Muslim di Tibet dan bagaimana posisi mereka di Tibet sebagai agama minoritas dan kehidupan mereka bersama masyarakat Tibet yang mayoritas beragama Buddha serta membahas mengenai peristiwa atau pergolakan pada tahun 1959 yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap masyarakat Tibet. Kesamaan dari jurnal dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan mengenai sejarah perkembangan muslim Tibet dan perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap hak-hak masyarakat Tibet juga minoritas muslim di

Tibet. Perbedaannya, jurnal ini fokus penelitiannya terdapat pada perkembangan muslim di Tibet dan peristiwa tahun 1959 antara pemerintahan Tiongkok dengan masyarakat Tibet, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada konflik diplomatik Tiongkok-India dalam menangani status kewarganegaraan muslim Tibet.

Ketiga, jurnal dari Mushtaque B Barq berjudul “Locating Tibet, Dalai Lama Lineage and Tibetan Muslims: A Brief Commentary”. Jurnal ini diterbitkan oleh The Tibetan Journal, Vol. 38, No. 1-2, tahun 2013. Membahas mengenai latar belakang wilayah Tibet, silsilah dari Dalai Lama yaitu seorang kepala biksu di Tibet. Selain itu di dalam jurnal ini juga membahas awal mula kemunculan Islam di Tibet serta sejarah muslim di wilayah Khasmir. Kesamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan mengenai bagaimana Islam tumbuh di Tibet dan kehidupan orang-orang muslim di Tibet terutama di wilayah Lhasa serta peran Dalai Lama sebagai kepala pemerintahan yang semasa memerintah dapat menyejahterakan masyarakat Tibet terutama orang-orang muslim yang tinggal di sana. Perbedaan jurnal ini yaitu fokus pembahasan yang masih umum mengenai sejarah Tibet dan peran Dalai Lama serta Islam di Tibet, sedangkan dalam penelitian ini pembahasannya mengenai dinamika sosial muslim Tibet dan bagaimana dampak dari kepemimpinan Tiongkok di Tibet.

Keempat, tesis karya Alexander Gaute berjudul "Muslim & Tibetan" dari Faculty of Social and Life Sciences Universitas Karlstad,

India yang ditulis pada tahun 2015. Sebuah tesis yang membahas mengenai komunitas Muslim Tibet di kawasan Khasmir yang terabaikan. Pembahasan dalam tesis ini menekankan pada peran agama dalam menciptakan ruang yang layak bagi para komunitas migran terutama muslim Tibet. Kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama berfokus pada keadaan muslim Tibet setelah datangnya Tiongkok di Tibet dan terjadinya insiden tahun 1959. Perbedaannya, tesis ini menganalisis bagaimana kehidupan muslim Tibet sebagai diaspora yang bertahan di wilayah pengungsian di Khasmir, India. Sedangkan penelitian ini menekankan pada bagaimana kehidupan sosial muslim di Tibet di tengah-tengah konflik diplomatik Tiongkok-India.

Dari uraian penelitian di atas, tidak ditemukan pembahasan spesifik mengenai dinamika sosial minoritas muslim Tibet dalam konflik diplomatik Tiongkok-India. Dalam penelitian ini mengemukakan tentang perkembangan muslim Tibet dan kedatangan Tiongkok ke Tibet yang menimbulkan pergolakan antara masyarakat Tibet termasuk muslim Tibet dengan tentara Tiongkok mengakibatkan pemberontakan antara mereka. Masuknya pemerintah India yang ikut mengklaim muslim Tibet sebagai bagian dari warga negara India menambah kemarahan Tiongkok yang merasa India ikut campur dalam permasalahan Tiongkok dengan Tibet. Pergolakan yang terjadi di Tibet secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Tibet termasuk muslim Tibet yang dahulu

hidup damai di bawah kepemimpinan Dalai Lama ke-14 kemudian berakhir bermigrasi ke Khasmir, India.

E. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kekuasaan yang dicetuskan oleh Max Weber.

1. Teori Kekuasaan

Kekuasaan merupakan hubungan sosial yang terjalin antara masyarakat, negara maupun umat manusia. Hubungan sosial yang terjalin ini meliputi interaksi antara dua orang atau lebih dan hubungan antara subjek dengan objek yang dikuasainya. Secara konseptual, kekuasaan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi pihak lain agar mau mengikuti perintah atau keinginannya (Hidayat, 2013).

Menurut Max Weber (1964), kekuasaan diartikan sebagai suatu potensi yang membuat seseorang di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri walaupun mendapat tantangan dari orang lain. Lebih lanjut, Weber menjelaskan bahwa pembahasan mengenai kekuasaan memiliki kaitan yang erat dengan rasionalitas atau kesadaran tindakan seseorang. Dalam hal ini, kekuasaan memungkinkan seseorang dalam relasi sosialnya berada di posisi dapat menjalankan apa yang diinginkannya. Kekuasaan ini ada pada seluruh bentuk relasi kehidupan manusia

mulai dari ranah keluarga, organisasi kemasyarakatan hingga pemerintah (Dr. Baharuddin, MA, 2021).

Definisi kekuasaan yang dikemukakan oleh Weber, bisa menjadi dua pemahaman, *pertama*, kehendak atau apa yang diinginkan seseorang di satu pihak dan *kedua*, pengaruh atau power yang memungkinkan seseorang bisa menjalankan keinginannya meski mendapatkan perlawanan. Dari kedua pemahaman tersebut, pengaruh atau power yang berkaitan dengan kehendak seseorang mengharuskan kita memahami kesadaran atas tindakannya (Dr. Baharuddin, MA, 2021). Selain itu, Max Weber juga membahas mengenai tipe-tipe kekuasaan dimana tipe-tipe kekuasaan dapat digunakan untuk melihat kekuasaan yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, Max Weber membaginya ke dalam tiga tipe, yaitu kekuasaan tradisional, kekuasaan rasional-legal, dan kekuasaan kharismatik.

Dalam ranah pemerintahan, kekuasaan dapat menentukan jalan kehidupan masyarakat dalam suatu negara, keberadaannya juga mencerminkan sifat hubungan antara pemimpin dengan bawahannya. Dari pengertian kekuasaan menurut Max Weber tersebut menyadarkan tentang bagaimana setiap individu atau kelompok memiliki kesempatan dalam memberi kesadaran dan diterapkan dalam tindakan-tindakan berupa perlawanan terhadap golongan atau kelompok tertentu. Teori kekuasaan dari Max Weber ini sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yakni bagaimana otoritas

Tiongkok dengan kemampuan mereka memaksa untuk menguasai Tibet, menjadikannya sebagai wilayah di bawah kekuasaan Tiongkok yang mengakibatkan terjadinya pergolakan antara keduanya. Perlawanan yang dilakukan masyarakat Tibet merupakan bentuk perlindungan diri dan wilayah mereka dari kekuasaan pemerintah Tiongkok.

2. Pendekatan Historis

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan historis. Pendekatan historis adalah cara penulisan sejarah dengan mengungkapkan kebenaran sejarah yang sesuai dengan urutan peristiwa atau suatu kejadian (Abdurrahman, 2011). Pendekatan historis membantu dalam merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif. Sumber-sumber yang telah didapatkan ditelaah dan dijabarkan dalam penulisan sejarah nantinya. Kemudian, pendekatan historis dalam penelitian ini terdapat pada pembahasan mengenai sejarah perkembangan muslim Tibet sebelum dan sesudah datangnya Tiongkok.

3. Pendekatan Sosiologis

Selain pendekatan historis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis merupakan metode yang pembahasannya mengenai suatu objek yang dilandaskan kepada masyarakat dalam cakupan pembahasan tersebut. Pendekatan sosiologis juga berisi pandangan mengenai keadaan masyarakat yang di dalamnya tidak

hanya membahas mengenai satu lapisan gejala sosial. Masyarakat dapat mempengaruhi kondisi sosial seseorang yang berada di lingkungan tersebut. Pengaruh tersebut dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Pendekatan sosiologis dapat dikatakan pula sebagai sejarah sosial, karena di dalam pembahasannya mencakup jenis hubungan sosial, konflik berdasarkan kepentingan peranan serta status sosial dan lainnya (Abdurrahman, 2011).

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini berfokus pada kajian pustaka (*library research*) dengan metode penelitiannya adalah menggunakan metode penelitian sejarah (Abdurrahman, 2011) yaitu:

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahap di mana peneliti mencari sumber atau data dengan cara mengumpulkan sumber yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian. Peneliti mengumpulkan sumber atau data dengan cara studi pustaka menggunakan buku, jurnal, artikel maupun skripsi yang berhubungan dengan muslim Tibet dan konflik diplomatik Tiongkok-India. Dalam tahap pengumpulan data, peneliti mencari buku yang dijadikan sumber utama yaitu buku berjudul *Islamic*

Shangri-La: Inter-Asian Relations and Lhasa's Muslim Communities 1600 to 1960 karangan David G. Atwill.

Di samping menggunakan sumber utama, peneliti juga menggunakan beberapa sumber lain sebagai pelengkap (sumber sekunder) seperti jurnal dari Attaullah Siddiqui berjudul *Muslims Of Tibet*, jurnal dari Nilma Yola berjudul *Minoritas Muslim Tibet di Tengah Komunitas Budha*, jurnal dari Nabhan Aiqani berjudul *Dinamika konflik China dan Tibet: Pendekatan Perdamaian Demokratis sebagai Upaya Penyelesaian Konflik* dan tesis dari Alexander Gaute berjudul *Muslim & Tibetan*.

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah menemukan dan mengumpulkan data, tahap selanjutnya yaitu peneliti mengkritik sumber atau menverifikasi sumber untuk memperoleh keaslian dengan melakukan kritik terhadap karya-karya ilmiah seperti jurnal, artikel, tesis maupun skripsi yang masih bersangkutan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Tahapan verifikasi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keabsahan dari sumber yang digunakan. Kritik sumber ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Kritik Ekstren

Dalam kritik ekstren yang perlu dikritik adalah tentang keautentikan sumber. Peneliti melakukan verifikasi terhadap sumber yang digunakan baik sumber buku atau artikel. Hal yang perlu diverifikasi adalah tentang penulisnya, waktu, tempat asal

pembuatan dan bahan yang digunakan seperti tinta, kertas, tulisan dan kondisi sumber dari luarnya.

Dalam kritik ekstren buku *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini* oleh M. Ali Kettani adalah buku yang diterjemahkan oleh Zakrowi Soejoeti (mantan Duta Besar RI untuk Republik Suriah merangkap Republik Cyprus) pada tahun 2005 oleh penerbit PT RajaGrafindo Persada. Buku aslinya adalah berbahasa Inggris dengan judul *Muslim Minorities In The World Today* diterbitkan oleh Mansell Publishing pada tahun 1986 yang didapatkan dari situs Google book.

b. Kritik Intern

Dalam kritik intern yang perlu dikritik adalah tentang kredibilitas isi bukunya serta meninjau ulang isi sumber dengan membandingkannya dengan isi sumber yang lainnya. Dalam tahapan verifikasi, teknik yang digunakan adalah dengan membandingkan sumber dari sumber-sumber yang telah diperoleh yaitu:

Kritik terhadap jurnal karya Tsering Topgyal yang berjudul “Identity Insecurity and the Tibetan Resistance Against China Pacific Affairs” peneliti membandingkan jurnal tersebut dengan jurnal karya Said Reza Huseini yang berjudul “Medieval Tibet in Perso-Islamic Sources” keduanya membahas mengenai wilayah Tibet. Dalam jurnal karya Tsering Topgyal, dijelaskan bahwa

dahulu Tibet dikenal sebagai kerajaan yang terisolasi karena kontaknya dengan negara lain terbatas, sedangkan dalam jurnal karya Huseini, Tibet menjadi kawasan penting dalam perdagangan dan pertukaran budaya dengan negara-negara lain. Dari kedua jurnal tersebut pembahasan mengenai wilayah Tibet yang lebih sesuai dengan keadaan Tibet terutama dalam proses masuknya Islam di Tibet melalui pedagang muslim dari daerah lain, maka sumber dari jurnal karya Said Reza Huseini lebih kuat mengenai alasan wilayah Tibet sebagai jalur perdagangan dari negara lain.

3. Penafsiran (Interpretasi)

Setelah mengkritik sumber yang telah didapatkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis sejarah atau melakukan penafsiran sejarah dari penelitian yang dilakukan (Abdurrahman, 2011). Dalam tahapan ini, peneliti berulang kali membaca dan menganalisis sumber-sumber yang diperoleh yang berkaitan dengan dinamika sosial minoritas muslim Tibet dalam konflik diplomatik Tiongkok-India. Setelah datangnya Tiongkok yang mulai menguasai wilayah Tibet dengan otoritas Tiongkok terhadap masyarakat Tibet mengakibatkan pergolakan antara masyarakat Tibet baik dari kalangan orang-orang Buddha maupun Islam. Keterlibatan pemerintah India dalam konflik antara Tiongkok dengan muslim Tibet, dianggap Tiongkok sebagai tindakan tidak ramah dan mengakibatkan adanya konflik diplomatik

antara Tiongkok-India terutama mengenai status kewarganegaraan muslim Tibet.

4. Historiografi

Pada tahapan ini atau tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti yaitu menjelaskan dan mengaitkan peristiwa-peristiwa sejarah kemudian menyesuaikan dengan urutan-urutan waktu. Peneliti menggunakan cara berfikir kronologis dan ditulis secara runtut dari awal masuknya Islam di Tibet sampai dampak dari konflik diplomatik Tiongkok-India tahun 1959-1980. Selanjutnya, penulis menyajikan penelitiannya dengan memaparkan hasil penelitian dari awal pembahasan sampai akhir atau penutup sesuai dengan yang ada di dalam sistematika pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mengetahui isi dari skripsi ini diperlukan adanya penjelasan yang jelas. Oleh karena itu, peneliti perlu memberikan sistematika pembahasan guna mengetahui isi pembahasan dari penelitian ini yakni:

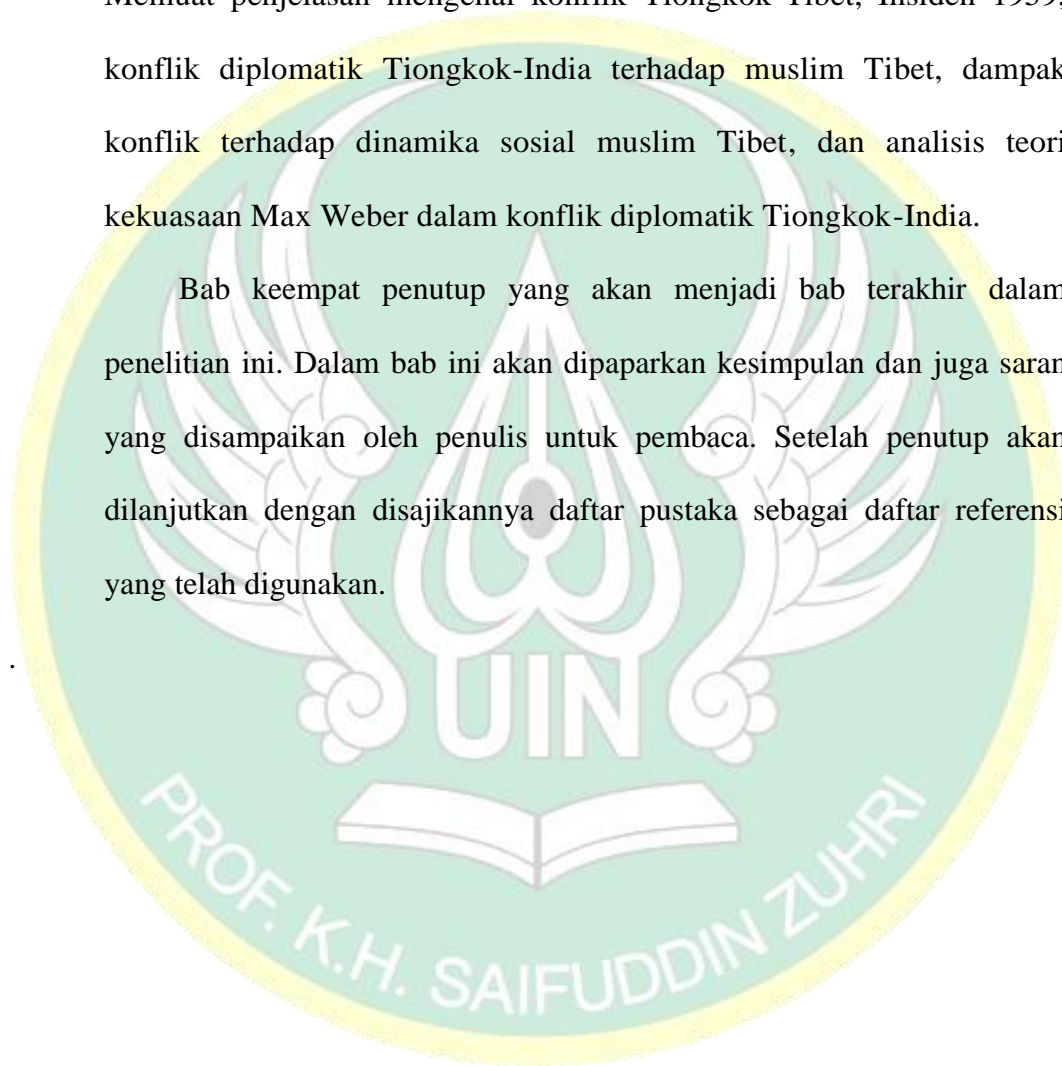
Bab pertama pendahuluan yang berisikan latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai sejarah perkembangan muslim Tibet hingga tahun 1952 yang di dalamnya berisi tentang sejarah masuknya Islam di Tibet, perkembangan minoritas muslim Tibet antara

lain berisi uraian tentang minoritas muslim Tibet “Khache” dan dinamika minoritas muslim Tibet.

Bab ketiga akan membahas dampak konflik diplomatik Tiongkok-India terhadap dinamika sosial minoritas Muslim Tibet (1959-1980). Memuat penjelasan mengenai konflik Tiongkok-Tibet, Insiden 1959, konflik diplomatik Tiongkok-India terhadap muslim Tibet, dampak konflik terhadap dinamika sosial muslim Tibet, dan analisis teori kekuasaan Max Weber dalam konflik diplomatik Tiongkok-India.

Bab keempat penutup yang akan menjadi bab terakhir dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan juga saran yang disampaikan oleh penulis untuk pembaca. Setelah penutup akan dilanjutkan dengan disajikannya daftar pustaka sebagai daftar referensi yang telah digunakan.



BAB II

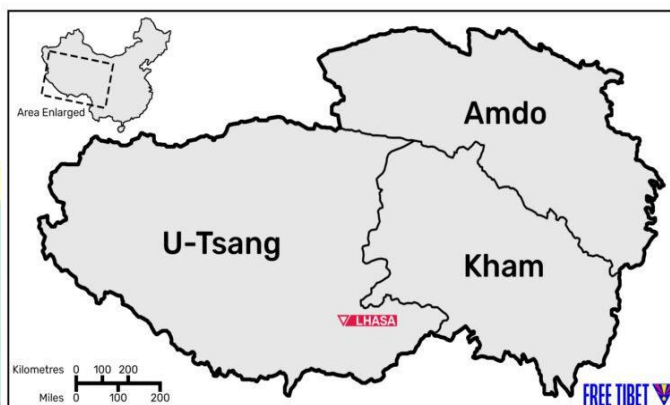
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MINORITAS MUSLIM TIBET

A. Sejarah Masuknya Islam di Tibet

Wilayah Tibet dikelilingi oleh negara Nepal, India Utara, Bhutan, Timur Iran, Rusia Selatan dan Mongolia dengan luas wilayah sebesar 2.333.125 km² (Sheikh, 1991). Dengan kawasan yang terletak di dataran tinggi dan pegunungan Himalaya, menjadikan Tibet sebagai pusat perdagangan dari berbagai negara. Dahulu Tibet juga dikenal sebagai kerajaan yang terisolasi karena kontaknya dengan negara lain terbatas (Tsering, 2017). Mayoritas masyarakat Tibet beragama Buddha, sedangkan agama leluhur mereka yaitu Bon. Walaupun Buddha merupakan agama mayoritas di Tibet, ajaran tersebut membutuhkan waktu beberapa abad untuk menggantikan agama Bon sebagai agama asli masyarakat Tibet sampai akhirnya mapan menjadi agama utama di sana pada abad ke-7.

Meskipun Tibet memiliki wilayah dengan medan keras penuh bebatuan namun Tibet menjadi kawasan penting dalam perdagangan dan pertukaran budaya dengan negara-negara lain. Tibet dikenal sebagai “Atap Dunia” dengan ketinggian wilayah rata-rata 4.500 meter (Huseini, 2013). “Tempat tinggal salju”, “Tanah para Lama”, “Tanah beriklim sejuk” adalah sebutan yang menjadi ciri khas Tibet. Ibukota Tibet adalah Lhasa yang terletak di lembah dekat dengan sungai *Tsangpao*, Tibet bagian

selatan. Bahasa dan dialek yang digunakan masyarakat Tibet diklasifikasikan sebagai anggota rumpun bahasa Tibeto-Burman. Tibet memiliki huruf dan bahasa yang berbeda dengan bahasa Tiongkok, serta logat yang terbagi menjadi 3 yaitu Weizang, Kang dan Amdo.



Gambar 1.1 Peta wilayah utama (provinsi) Tibet.

Sumber: <https://freetibet.org/freedom-for-tibet/history-of-tibet/where-is-tibet/>

Secara geografis, Tibet dibagi menjadi empat wilayah utama. Di sebelah barat laut terdapat wilayah Changtang, sebuah kawasan gurun beku yang membentang dari timur ke barat sejauh lebih dari 800 mil. Di sebelah selatan Changtang terletak provinsi U-Tsang, bagian selatan dan barat daya wilayah ini dibatasi oleh pegunungan Himalaya. Di sebelah timur U-Tsang terletak provinsi Kham yang merupakan wilayah paling subur dan terpadat di Tibet. Selanjutnya di sebelah utara Kham terletak daerah Amdo, sedangkan di perbatasan timur Kham dan Amdo terletak perbatasan antara Tibet dengan Tiongkok (Stocks, 2016).

Penduduk asli Tibet adalah etnis Tibtan dengan mayoritas masyarakatnya beragama Buddha, kehidupan sosial dan adat istiadat masyarakat Tibet sangat religius. Kehidupan religius mereka dibantu oleh

Seorang Biksu atau disebut dengan Lama. Lama memiliki tugas untuk memimpin berbagai upacara di Tibet. Sebagai penganut ajaran Buddha, kehidupan masyarakat Tibet dipimpin oleh seorang bergelar Yang Mulia Dalai Lama. Dalai Lama bukan hanya sebagai seorang pemimpin spiritual saja tetapi juga sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi di Tibet yang sangat dihormati oleh masyarakatnya.

Pemilihan Dalai Lama dilakukan dengan berbagai ritual kepercayaan Buddhisme Tibet yang telah menjadi tradisi dan kepercayaan masyarakat Tibet. Penobatan untuk gelar Dalai Lama dilakukan dengan sumpah Samanera saat masih usia muda sebagai biksu pemulu dan sumpah secara formal sebagai pemimpin Tibet melalui sumpah Gelong namun Dalai Lama ke-14 dinobatkan pada usia 15 tahun dikarenakan terjadi situasi mendesak di Tibet yaitu invasi Tiongkok ke Tibet (Kurnianingrum, 2015). Oleh masyarakat Tibet, Dalai Lama diyakini sebagai manifestasi *Avalokiteshvara* atau *Chenrezig*, *Bodhisattva Welas Asih*, pemegang teratai putih dan bagi orang lain Dalai Lama juga berarti 'god king' (Stocks, 2016).

Dalai Lama merupakan kepala Biksu Buddha dari silsilah Gelugpa. Dalai artinya "Lautan" dalam bahasa Mongol dan Lama artinya "Guru" dalam bahasa Tibet, maka Dalai Lama menurut terjemahan istilah tersebut sebagai "Lautan Kebijaksanaan" (Stocks, 2016). Gelar Dalai Lama pertama kali diberikan oleh Altan Khan Seorang penguasa Mongol kepada Sonam Gyatso yang kemudian menjadi Dalai Lama ketiga (Barq, 2013).

Walaupun Sonam Gyatso menjadi Lama pertama yang memegang gelar Dalai Lama, namun karena ia adalah anggota ketiga dari garis keturunannya maka ia menjadi Dalai Lama ketiga sedangkan Lama pertama yaitu Gedun Drupa (1391-1474) dan Lama kedua Gedun Gyatso (1476-1542), kemudian gelar dilanjutkan oleh Dalai Lama keempat bernama Yonten Gyatso (1589-1616).

Dalai Lama kelima, Ngawang Lobsang Gyatso (1617-1682) diangkat menjadi otoritas spiritual dan politik tertinggi di Tibet. Setelah Dalai Lama kelima meninggal, Tsangyang Gyatso diangkat menjadi Dalai Lama keenam yang bertahta pada tahun 1697. Kematian Dalai Lama keenam menjadikan Kelsang Gyatso diangkat menjadi Dalai Lama ketujuh dan meninggal pada tahun 1757, Jamphel Gyatso Dalai Lama kedelapan kemudian di bawa ke Lhasa pada tahun 1762 (Barq, 2013).

Dalai Lama ke-12 Thinley Gyatso meninggal pada usia 20 tahun hanya berselang 3 tahun setelah ia mengambil alih kekuasaan sedangkan Dalai Lama ke-13 Thupten Gyatso (1876-1933) mengambil alih pemerintahan Tibet pada tahun 1895 setelah pengunduran diri Bupati Demo Kundeling yang saat itu memimpin pemerintahan Tibet sementara setelah kematian Dalai Lama ke-12 (Gelek, 2010). Hingga sampai saat ini, gelar Dalai Lama sudah mencapai generasi ke-14 bernama Tenzin Gyatso (1935-sekarang) yang dianggap sebagai reinkarnasi dari Dalai Lama ke-13.

Tabel 1. 1 Daftar Dalai Lama

No	Nama	Tahun Dilantik
1.	Gedun Drupa	1416
2.	Gedun Gyatso	1486
3.	Sonam Gyatso	1565
4.	Yonten Gyatso	1614
5.	Ngawang Lobsang Gyatso	1642
6.	Tsangyang Gyatso	1697
7.	Kelsang Gyatso	1751
8.	Jamphel Gyatso	1781
9.	Lungtok Gyatso	1810
10.	Tsultrim Gyatso	1831
11.	Khedrup Gyatso	1849
12.	Thinley Gyatso	1860
13.	Thupten Gyatso	1895
14.	Tenzin Gyatso	1950

Sumber: <https://namgyal.org/pages/dalailamas>

Pada abad ke-17 saat adanya bangsa Manchu yang melihat betapa besar pengabdian masyarakat Tibet terhadap agama Buddha dan menyadari pentingnya Dalai Lama bagi mereka, bangsa Manchu kemudian memperkenalkan sistem multiplisitas kandidat pada tahun 1793. Kaisar Ch'ien Lung (1736-1796) menetapkan metode *serbum* (guci emas) untuk pemilihan Dalai Lama. Metode pemilihan Dalai Lama menggunakan guci

emas dilakukan dengan menuliskan nama-nama kandidat yang disetujui dalam secarik kertas kemudian diundi. Penguasa Manchu selalu memastikan bahwa nama anak laki-laki yang mereka pilih akan muncul dalam undian. Pada masa Kaisar Chia Ching (1796-1820) menuliskan metode pemilihan Dalai Lama ini pada empat prasasti di sisi kiri pintu depan kuil Jo Khang dan di ceruk di beranda sebelah kanan kuil utama Biara Sera (Sheel, 1989).

Namun menurut keyakinan dan tradisi Tibet, Dalai Lama adalah inkarnasi *Avalokiteshvara* atau *Chenrezig, Bodhisattva Welas Asih* (dewa pelindung Tibet) dengan demikian terkait kepercayaan orang Tibet pada inkarnasi dan kelahiran kembali mereka yang meninggal kemudian memberikan lembaga Dalai Lama otoritas ilahi. Panchen Gedun menyarankan pemilihan Dalai Lama secara terus menerus menggunakan sistem penemuan kelahiran kembali mereka. Dalam hal ini, orang-orang Tibet tidak memilih Dalai Lama tetapi menemukannya terutama untuk posisi bermartabat tinggi di Tibet (Sheel, 1989).

Ketika seorang Dalai Lama meninggal dunia, penemuan dan pemilihan penggantinya yaitu dilakukan dengan cara Depa Zhung (pemerintah Tibet) dengan maksud untuk memperoleh keterangan-keterangan yang harus dicari untuk mengidentifikasi Dalai Lama yang baru kemudian berkonsultasi dengan para pemuka Gelupga tinggi dan Panchen Lama dari biara Tashilhunpo jika sudah berumur (tua) serta peramal dari wilayah Nechung Choekyong. Rincian keterangan-

keterangan yang dikonsultasikan berkaitan dengan wilayah tempat Dalai Lama baru yang ditemukan, tahun kelahiran ayah, ibu dan dirinya sendiri, lanskap di dekat rumahnya dan lainnya (Sheel, 1989).

Menurut tradisi, kelahiran seorang Dalai Lama diramalkan oleh manifestasi surgawi dengan ciri-ciri: pelangi di langit cerah akan muncul di atas rumahnya saat ia lahir atau orangtuanya memiliki penglihatan surgawi tentangnya. Tiga atau empat anak laki-laki yang lahir dengan klaim manifestasi luar biasa tersebut akan diuji dengan diletakkan di hadapan para pejabat tinggi Gelugpa terkemuka. Melalui konsultasi dan kesepakatan bersama, para pejabat tinggi ini akhirnya memutuskan siapa Dalai Lama yang sebenarnya. Dalai Lama yang baru yaitu seorang anak laki-laki berusia tiga atau empat tahun harus dapat mengenali barang-barang ritual dan barang-barang pribadi milik pendahulunya (Sheel, 1989).

Sebagai daerah yang kental akan agama Buddha bahkan memiliki pemimpin pemerintahan seorang biksu Buddha tidak menghalangi agama lain masuk ke Tibet. Seiring berjalannya waktu agama lain mulai diterima dan berkembang di Tibet adalah agama Islam. Bukti pertama pengaruh Islam di wilayah Tibet dapat ditelusuri hingga abad ke-7 ketika kekhalifahan Abbasiyah menguasai Bagdad dan kekaisaran Tibet. Kerajaan Tibet memulai ekspansi agresif segera setelah agama Buddha masuk, membuat orang Tibet dikenal oleh para penulis Muslim yang mulai menyebut Tibet atau Tubbat dalam teks mereka (Gaute, 2015). Ibnu

Khaldun, Al-Yaqub dan Abar menyebut Tibet dalam berbagai tulisannya dan menyebutnya dengan *Tibbet, Tubbat, dan Tibbat*.

Islam masuk di Tibet dibawa oleh para pedagang Islam atau migran muslim yang berasal dari Kasmir, Tiongkok, Nepal, dan Ladakh (Sheikh, 1991). Umat Islam di Tibet sebagian besar berasal dari Kasmir dan mereka datang ke Tibet dengan tujuan berdagang (Radhu, 1997). Masuk Islam secara besar-besaran tidak pernah terjadi di Tibet. Sebagian besar perpindahan agama terjadi melalui perkawinan antar agama. Pedagang dan pengusaha muslim menikahi wanita Tibet yang non muslim, melahirkan anak dan mulai tinggal permanen di Tibet. Dari pernikahan antara pedagang muslim dengan wanita Tibet yang non muslim kemudian mengikuti agama suaminya dan mereka tinggal di Tibet yang mayoritas masyarakatnya beragama Buddha menjadi salah satu penyebab terbentuknya minoritas muslim di Tibet.

Beberapa bukti mengenai keberadaan umat Islam di Tibet terdapat pada bukti-bukti dokumen Tibet di mana umat Islam biasanya disebut dengan istilah yang sedikit merendahkan. Dalam teks keagamaan seperti *Kalacakra Tantra*, orang Tibet menyebut muslim sebagai orang luar, dari istilah Sansekerta *mleechas* disebut sebagai orang yang tidak beriman sedangkan dalam teks-teks sastra Tibet menggunakan istilah orang asing (Atwill, 2018).

Pada awal abad ke-8, menurut sejarawan dan ahli geografi Islam banyak pelancong, kafilah, pedagang muslim bahkan masjid (Atwill,

2018). Thomas Arnold menyebutkan, sekelompok pedagang muslim dari Khasmir dan Ladakh datang ke Tibet sebagai pedagang pada abad ke-12 dan banyak dari para pedagang muslim menetap di Tibet dan kemudian menikahi wanita asli Tibet, yang karena kewajibannya berpindah agama ke agama suami mereka (Barq, 2013). Ahli Tibetologi, Marc Gaborieau menyatakan masuknya umat Islam Khasmir ke Tibet kira-kira terjadi pada abad ke-14. Pada abad ke-15, warga Khasmir menjadi penduduk muslim pertama di Tibet Tengah namun hingga akhir abad ke-16 dalam menelusuri komunitas muslim hanya sedikit umat Islam yang tinggal permanen di Tibet (Atwill, 2018). Barulah pada abad ke-17, umat Islam mulai tinggal di Lhasa atas persetujuan Dalai Lama kelima (Barq, 2013).

Dalai Lama kelima memiliki peran penting dalam masuk dan berkembangnya Islam di Tibet. Selama masa pemerintahannya, Ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang menjunjung tinggi perdamaian dan persaudaraan antar agama Islam dan Buddha yang dapat hidup berdampingan secara damai di kehidupan masyarakat tradisional. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana pada abad ke-17, Dalai Lama kelima langsung setuju untuk memberikan tanah di Lhasa kepada umat Islam untuk membangun masjid. Alhasil umat Islam menjadi lebih mudah berbaur dengan masyarakat Tibet walaupun mereka berbeda agama (Barq, 2013).

Sarjana Tibet, Jose Cabezon juga menyatakan ada hubungan kuat antara munculnya umat Islam dengan undangan masyarakat non Tibet

yang dilakukan oleh Dalai Lama kelima sebagai bagian dari kebijakan yang lebih besar untuk mendorong keberagaman etnis, budaya dan ekonomi di Tibet. Apalagi sebagian besar umat Islam yang datang ke Tibet adalah para pedagang yang datang dari berbagai daerah.

Kemungkinan besar komunitas muslim mulai bermigrasi ke Tibet ketika kepentingan ekonomi membawa mereka ke sana melalui berbagai rute perdagangan. Jose Cabezon memetakan dua jalur yang kemungkinan dilalui Islam untuk memasuki Tibet. Pertama, melalui rute barat dari Turkestan, Baltistan dan Ladakh dan Islam memasuki Lhasa terutama melalui Ladakh (Singh, 2015). Kedua, melalui jalur perdagangan timur karena Islam menyebar dari Arab melalui Persia dan Afghanistan tiba di Tiongkok, melalui jalur sutra Asia Tengah. Dari Ningxia dan tempat-tempat lainnya di Tiongkok, Islam bergerak ke Tibet timur (Radhu, 1997).

Sedangkan menurut Marc Gaborieau menulis jalur lain yang ditempuh muslim Kashmir untuk memasuki Tibet dari Asia Selatan melalui jaringan pedagang Kashmir yang lebih besar menetap di kota-kota Lahore, Delhi, Banaras, Patna, Dhakka (Bangladesh) dan Culcatta (Kolkata). Oleh karena itu, ada dua kelompok minoritas muslim di Tibet saat ini, muslim Kashmir yang juga dikenal sebagai muslim Tibet dan muslim Tiongkok yang juga dikenal sebagai Hui (Singh, 2015).

Kedatangan umat Islam di Tibet yang berasal dari berbagai daerah di luar wilayah Tibet, masing-masing memiliki ciri khas yang membedakan dari daerah mana mereka berasal. Seperti umat Islam yang berasal dari

Khasmir menjadi wilayah yang mendatangkan umat Islam di Tibet (Siddiqui, 1991). Umat Islam dari wilayah Tiongkok, berasal dari beberapa kota kecil yang wilayahnya terkenal akan hasil pertanian. Untuk wilayah Nepal dan Ladakh, mereka dikenal berpendidikan walaupun umat Islam dari Nepal dan Ladakh yang menetap di Tibet hanya sedikit, akan tetapi mereka memiliki hubungan baik dengan pemerintah Tibet.

Thomas Arnold dalam bukunya *The Preaching of Islam* mengatakan bahwa perilaku dan interaksi sosial bertanggung jawab atas pertumbuhan populasi muslim Tibet menjadi komunitas yang cukup besar di sekitas Lhasa, ibukota Tibet. Hal ini juga didukung dengan respon baik Dalai Lama kelima terhadap kedatangan umat Islam di Tibet.

B. Perkembangan Minoritas Muslim Tibet

1. Minoritas Muslim Tibet “Khache”

Kelompok muslim yang menetap di wilayah Tibet, terutama di Lhasa mendapat beberapa sebutan menurut asal daerah kedatangan mereka dahulu. Mereka di sebut “*Kha Che*” dalam bahasa Tibet, jika mereka mengambil garis keturunan dari Khasmir (walaupun orang Nepal, Ladakhi, dan Sikh juga berafiliasi dengan kelompok ini) dan sebutan “*Gya Kha Che*” jika mereka mengambil garis keturunan dari China (Gaute, 2015).

Muslim yang berasal dari Tiongkok juga mendapat sebutan lain seperti Wapaling Khache. Nenek moyang mereka berasal dari provinsi Gansu, Shanxi, Qinghai, Sichuan, dan Yunnan di Tiongkok. Oleh

orang-orang Tiongkok, umat Islam yang berasal dari sana atau ada darah Tionghoanya disebut dengan muslim Hui. Pada awal abad ke-18, pada masa pemerintahan Kaisar Kangxi, umat Islam Tiongkok menetap di Lhasa. Beberapa dari mereka juga merupakan keturunan tentara Tiongkok yang berperang melawan Gurkha pada tahun 1793.

Komunitas muslim Lhasa terdiri dari orang-orang yang berasal dari Tiongkok, Khasmir, Nepal, Ladakh, dan Sikh (Radhu, 1997) Terdapat bukti bahwa kedua sub komunitas ini memiliki identitas yang sangat berbeda dan mendiami wilayah yang berbeda di Lhasa. Khache berpusat di Masjid Chota (kecil) dan muslim Tionghoa berpusat di Masjid Bara (besar). Komunitas-komunitas ini tampaknya telah menetap dengan damai sebagai pedagang di Lhasa. Sebagian besar Khache tinggal di Lhasa, di sekitar Jokhang. Selain itu, muslim Khache juga ada yang tinggal di pusat administrasi penting seperti di wilayah Gyantse, Shigatse, Lhartse, dan Tsetang (Jest, 1995).

Selain keberadaan Khache dan penyebarannya di seluruh wilayah Tibet, kebingungan terjadi mengenai penyebutan terhadap Khache yang terbagi menjadi dua kategori pertama, orang luar yang cenderung mengambil dari terminologi eksternal dan kedua, non pribumi yang memperlakukan Khache sebagai orang asing. Kebingungan arti Khache juga semakin buruk ketika para penulis atau pengamat asing dalam menyebut muslim Tibet, mereka menggunakan istilah-istilah berbeda seperti menyebut mereka sebagai Ladakhi,

terkadang Kasmiri dan dalam bahasa China mereka menyebut semua muslim Tibet sebagai Hui.

Menurut David G. Atwill dalam bukunya *Islamic Shangri La* berpendapat mengenai keberadaan Khache dan arti Khache di Tibet. Selama beberapa abad terakhir, istilah Tibet “Khache” mempunyai tiga konotasi yaitu sebagai penanda geografis, sebuah agama atau istilah khusus untuk menunjukkan seorang muslim Tibet. Arti Khache mengikuti terminologis evolusi yang menghubungkan interaksi kronologis antara Tibet dengan Kasmir dan Islam.

Terdapat tiga tahap dalam mengartikan Khache, dalam tahap yang paling awal kata Khache dalam bahasa Tibet merujuk secara sempit pada wilayah Kasmir di Himalaya atau masyarakat Kasmir itu sendiri. Tahap kedua, dimulai beberapa dekade setelah berdirinya pemukiman permanen pertama Kasmir dan dengan kedatangan imigran muslim dari Tiongkok yang pada saat itu juga disebut dengan Khache. Dengan kedatangan muslim Tiongkok, makna ganda antara Muslim Kasmir dan Khache kemudian dengan segera dipisahkan dan istilah Khache berkembang menjadi sebutan untuk semua Muslim. Tahap ketiga, ketika komunitas Khache menetap, menikah dan menjadi muslim Tibet, istilah Khache kemudian merujuk pada orang Tibet, bukan lagi tempat asing atau agama asing. Dari pengertian Khache secara umum dan terminologi, orang Tibet mempunyai istilah yang memungkinkan seseorang untuk membedakan antara penduduk

muslim Tibet yang menetap dan penduduk muslim sementara yang berasal dari wilayah tetangga (Atwill, 2018).

Di Lhasa, Khache dibagi menjadi dua komunitas utama berdasarkan bahasa dan budaya yaitu komunitas warisan Asia Selatan dan komunitas warisan Tiongkok. Pembagian ini mengacu pada lingkungan tempat mereka menetap dan membangun masjid yaitu di bagian Barkor atau Wapaling. Hal ini berguna untuk membedakan mereka apakah berasal dari Wapaling Khache (Tiongkok) atau Barkor Khache (Asia Selatan).

Barkor Khache yang berasal dari Asia Selatan, sebagian besar bekerja di perdagangan yang berkumpul di sekitar area pusat pasar Barkor dekat kuil Jokhang. Berbeda dengan Wapaling Khache yang berasal dari Tiongkok, mereka tinggal di lingkungan Wapaling Lhasa yang berada di sudut tenggara Lhasa dekat dengan sungai Tsangpao. Area tempat tinggal mereka lebih dekat dengan ladang dan area yang diizinkan untuk menyembelih hewan. Wapaling Khache sebagian besar terdiri dari penjual sayur dan tukang daging yang memiliki reputasi baik karena menjual dagangan berkualitas terbaik (Atwill, 2018).

Selain dua komunitas utama muslim Tibet yang paling sering menjadi perbincangan, ada beberapa komunitas muslim Tibet yang juga memiliki sebutan lain berdasarkan asal mereka seperti Ladakhi Khache yang cenderung sering disamakan dengan muslim Tibet

setempat. Meskipun dengan jelas bahwa mereka merupakan pedagang terkemuka dari Ladakh yang mempunyai hubungan kuat dengan pemerintah pusat Tibet pada tahun 1920-an. Suku Ladhaki memang mempunyai perwakilan resmi di Lhasa disebut *consul* dalam sumber bahasa Inggris. Pemerintah Tibet menganggap mereka yang mempertahankan status Ladakhnya tidak dianggap sebagai orang Tibet dan dibebaskan dari sejumlah pajak dan kewajiban.

Singpa Khache merupakan sub kelompok dari Barkor Khache dan sering diidentifikasi sebagai “Sikh”. Menurut asal usulnya, Singpa Khache berasal dari tentara Dogra yang melakukan penyerangan ke Tibet dan menjadi tawanan pemerintah Tibet yang kemudian di bebaskan di berbagai tempat sekitar Tibet. Setelah perjanjian Nepal-Tibet tahun 1856, pihak Nepal meminta Tibet untuk mengembalikan tawanan perang yang dahulu mereka tangkap. Singpa Khache merupakan kelompok yang menonjol dalam komunitas Khache dan jumlah mereka diperkirakan 20% dari hampir 200 keluarga Barkor Khache yang tinggal di Lhasa pada awal tahun 1950-an. Sub komunitas lainnya yaitu Silling Khache merupakan Hui Tibet dari provinsi Qianghai yang cenderung diidentifikasi dalam komunitas muslim Lhasa. Secara umum mereka selaras dengan Wapaling Khache tetapi terdapat perbedaan yang memungkinkan mereka mempertahankan identitas terpisah dari Wapaling Khache lainnya (Atwill, 2018).

Komunitas Khache berada hampir di seluruh wilayah Tibet ke barat sampai Srinagar di Kashmir, ke timur hingga Dartsedo di Kham, ke utara hingga Biara Labrang di Amdo, dan sampai ke selatan hingga kota perbukitan Himalaya, Kalimpong dan Darjeeling di India utara. Khache dapat ditemukan hampir disetiap segmen kehidupan Tibet. Mereka diakui sebagai kelompok masyarakat awam yang paling melek huruf dan multibahasa. Orang-orang Tibet, termasuk Dalai Lama ke-14 sering memuji Khache atas kemampuan linguistik mereka khususnya dalam penguasaan dialek Lhasa yang rumit. Mereka juga terkenal karena multibahasa dengan banyak muslim Tibet yang berbicara bahasa Cina, Hindi, Urdu, dan Arab didorong oleh peran penting mereka dalam perdagangan Tibet dengan tetangga mereka di Himalaya (Atwill, 2018).

Khache Phalu merupakan sebutan untuk seorang pemikir muslim Tibet yang memiliki wawasan tentang budaya dan kepercayaan Tibet dan ahli dalam bidang sastra (Szabo, 2017). Mereka menampilkan kehidupan dan adat istiadat Tibet melalui karya tulis dan dianggap sebagai karya tulis sastra Tibet yang paling penting yang pernah mereka tulis. Khache Phalu sangat terkenal, seorang penyair yang banyak menerjemahkan puisi Persia dan juga menulis bukunya sendiri.

Kecakapan menulis sastra oleh Khache Phalu menunjukkan pengakuan yang lebih luas atas keterampilan sastra Khache. Salah satu

karya muslim Tibet yang terbesar dan terpopuler yaitu buku berjudul *Advice on The Art of Living* yang di tulis oleh seorang Khache Phalu pada abad ke-18 bernama Faizullah (Atwill, 2018). Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ditulis oleh Dawa Norbu berjudul *Khache Phalu's Advice on the Art of Living* (Gaute, 2015).

Di Tibet, Khache dianggap sebagai warga negara India sehingga berstatus orang asing. Dalam kasus perkawinan campuran, anak laki-laki dianggap sebagai warga negara India dan anak perempuan dianggap sebagai warga Tibet dan dia harus membayar pajak tahunan sebesar satu *srang* (koin 1 perak Srang seberat 18,5 gram) (Jest, 1995).

Bagan Komunitas Muslim Khache



2. Dinamika Minoritas Muslim Tibet

Lhasa merupakan ibukota Tibet yang suci dengan wilayahnya di kelilingi banyak kuil suci Buddha. Ibukota Tibet ini telah menjadi tempat berdirinya empat masjid selama lebih dari satu abad dan di sana muslim Tibet telah menjadi tokoh terkemuka selama lebih dari tiga abad. Terletak di dalam dan sekitar Lhasa, masjid-masjid tersebut tidak hanya terlihat jelas, namun juga memainkan peran integral dalam kehidupan sosial di Lhasa (Atwill, 2018).



Gambar 3.3 Masjid Agung Lhasa. Sumber:

<https://www.islamichinatravel.com/destination-guide/lhasa/lhasa-masjid/lhasa-great-mosque/>

Muslim Tibet membangun beberapa masjid di Tibet terutama di ibukota Lhasa, masjid ini terletak pada tempat yang disebut *kha che ling ka* (Taman Kashmir Masjid). Masjid pertama di Lhasa menurut tradisi dibangun pada tahun 1650 yang terletak di taman Anak Panah Jangkauan Jauh (*rgyang mda' khan*), beberapa mil di sebelah barat Lhasa tepatnya di sebelah utara Istana Muslim Panas Dalai Lama (*nor bu gling kha*). Komplek ini menjadi menonjol dalam lingkungan

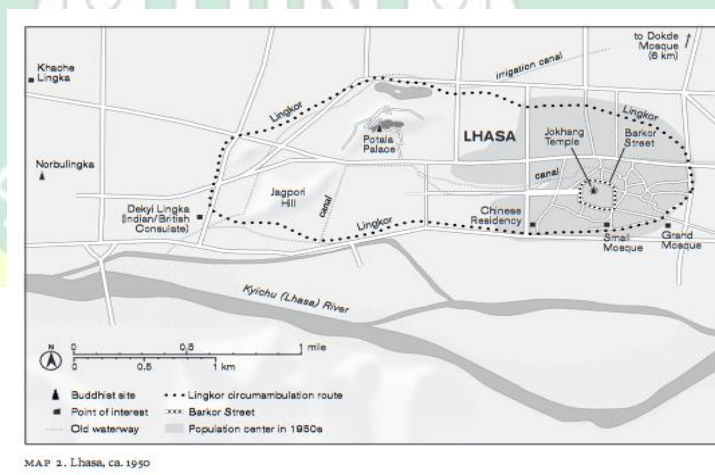
keagamaan dan sosial di Lhasa (Atwill, 2018). Menurut Amir Uddin Nadwi ada empat masjid di ibu kota Lhasa, dua di Shigatse dan satu di Tsethang (Gaute, 2015). Masjid-masjid ini terpelihara dengan baik dan menjadi pusat kehidupan bermasyarakat umat Islam. Mereka dibangun dengan cara yang sederhana dan tidak ada yang memiliki kubah (Siddiqui, 1991).

Di Tibet, perkembangan Khache semakin pesat sehingga mereka membuat masjid kedua yang berukuran lebih besar kemudian didirikan tepat di seberang masjid pertama untuk menampung lebih banyak muslim Tibet selama hari raya keagamaan. Masjid yang paling menonjol di Lhasa yaitu Masjid Agung yang didirikan paling lambat pada abad ke-18, berada di tepi tenggara kota di lingkungan Wapaling. Selama berabad-abad, Masjid Agung dikenal dengan beberapa sebutan. Di Lhasa sebutan yang paling umum adalah Masjid Agung atau Masjid China. Sebelum tahun 1959, nama masjid ini mengadopsi dari nama lingkungan di mana masjid ini didirikan dan disebut dengan Masjid Wapaling (Atwill, 2018).

Masjid Dokde terletak beberapa mil di seberang lembah di utara Lhasa dan berdekatan dengan kompleks pemakaman muslim. Masjid ini merupakan masjid yang paling sedikit terdokumentasi dengan baik diantara empat masjid yang berada di Lhasa. Berdirinya Masjid Dokde tidak lepas dari peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Tibet yang pada saat itu memerintahkan Wapaling Khache

untuk mengosongkan area pemakaman mereka di Lhasa dan merelokasikan ke tempat yang jauh di pedesaan. Lembah Dokde yang terisolasi dan kurang menarik perhatian muslim dalam menguburkan jenazah kemudian mereka gunakan untuk menjadi area pemakaman dan juga menjadi lokasi berdirinya masjid kecil yang menyatu dengan makam. Beberapa orang memperkirakan masjid ini berdiri pada tahun 1716.

Pada awal abad ke-20, masjid keempat dan terakhir dibangun di lingkungan Barkor tepat di sebelah selatan jalur ziarah suci Lingkor di Lhasa. Masjid ini dalam bahasa Tibet sering disebut sebagai masjid kecil (*lha khang chung*), namun oleh banyak penduduk Lhasa dikenal sebagai Masjid Barkor atau Masjid Rapsel Alley. Meskipun tanggal pasti pembangunan masjid tersebut masih diperdebatkan, kemungkinan besar masjid ini dibangun pada tahun awal abad ke-20.



Gambar 3.4 Peta ibukota Lhasa dengan pembagian wilayah tempat tinggal muslim dan Buddha. Sumber: (Atwill, 2018)

Selain di Lhasa, banyak kota lain di Tibet yang menjadi tempat tinggal Khache walaupun populasi mereka lebih sedikit daripada di sana. Wilayah Shigatse, menjadi salah satu kota yang menjadi rumah bagi lebih dari seratus rumah tangga Khache. Di sana mereka juga membangun masjid, meskipun ada yang berpendapat bahwa masjid Shigatse awalnya dibangun pada tahun 1443 bahkan ada lagi yang berpendapat masjid ini dibangun tahun 1343. Akan tetapi, kemungkinan yang lebih besar bahwasanya masjid ini dibangun pada waktu yang sama dengan pembangunan masjid di Lhasa dan tidak lebih dari akhir abad ke-17 (Atwill, 2018).

Di luar pusat kota besar seperti Lhasa dan Shigatse, Khache hidup di wilayah lain yang cenderung hanya terdiri dari segelintir keluarga. Berbeda dengan di wilayah Tsetang yang dahulu merupakan ibu kota Tibet pra Buddha yang berada di tenggara Lhasa, di wilayah ini puluhan rumah tangga Khache tetap aktif hingga tahun 1950-an. Khache yang hidup permanen di Tibet, hampir semuanya memiliki masjid dan terdapat di seluruh wilayah Tibet tengah,

Pada tahun 1934, seorang muslim Tiongkok bernama Zhu Xiu memperkirakan jumlah Khache pada saat itu berkisar 800 rumah tangga dari total populasi awam Lhasa yang berjumlah 6.500 rumah tangga. Lebih lanjut, tahun 1940-an beberapa artikel berbahasa Mandarin mengenai komunitas muslim Tibet melaporkan bahwa suku Hui yang berasal dari Shaanxi, Sichuan dan Yunnan mewakili dua pertiga komunitas muslim,

sedangkan muslim India dan Tibet mewakili sepertiganya. Perkiraan angka populasi muslim di Tibet mulai akurat tahun 1950-an. Pada tahun 1950, sekitar 10% dari 30.000 penduduk awam di Lhasa adalah muslim (Atwill, 2018).

Seorang muslim China asal Beijing yang bernama Xue Wenbo yang memasuki wilayah Lhasa bersama Tentara Pembebasan Rakyat pada bulan desember 1951, menyimpulkan bahwa jumlah muslim Hui di Lhasa mempunyai 150 rumah tangga dengan populasi beberapa ribu orang. Perkiraan resmi tahun 1953 menyatakan bahwa Khache memiliki 141 rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah Khache di Lhasa pada pertengahan abad ke-19 melebihi 3000 orang, sedangkan populasi komunitas muslim yang lebih kecil di wilayah Shigatse, Tsetang, dan kota-kota lainnya di Tibet Tengah di luar kota Lhasa mendekati jumlah muslim di Lhasa namun tidak melampaui populasi muslim di sana (Atwill, 2018).

Konfirmasi lebih lanjut mengenai perkiraan jumlah 3000 muslim yang tinggal di Tibet Tengah dengan presisi yang tinggi adalah pada tahun 1960 selama terjadi insiden muslim Tibet dengan Tiongkok. Pada saat itu, orang Tiongkok dan pejabat India mengidentifikasi dan mengizinkan hampir 1500 orang Barkor Khache yang akan meninggalkan Tibet dan memasuki India berdasarkan identitas Khasmir mereka. Beberapa lusin lainnya diizinkan berangkat ke Nepal terutama bagi mereka yang menikah dengan orang asli Nepal, sedangkan Wapaling Khache yang masih berada di Tibet berjumlah lebih dari 1000 orang (Atwill, 2018).

Muslim Tibet bebas menjalankan agamanya dan setara di mata hukum. Pada masa pemerintahan Dalai Lama kelima, muslim Tibet diberi status khusus yang disebut *Minna Dronbhod* (undangan untuk berbagai ras). Meskipun mereka tidak diperbolehkan mendakwahkan agama, mereka ditawarkan fasilitas-fasilitas oleh Dalai Lama (Siddiqui, 1991).

Dalam menangani permasalahan antar umat Islam, muslim Tibet akan menyelesaikan secara mandiri baik dengan cara konsultasi maupun nasihat. Mereka membuat sebuah komite namun tetap atas persetujuan Dalai Lama Kelima Ngawang Lobsang Gyamtso (1617-1682). Etnolog Corneille Jest menceritakan mengenai Khache terutama sebelum kedatangan Tiongkok ke Tibet. Menurut Jest, pada abad ke-17 untuk mengatur diri mereka sendiri, muslim Tibet mengaturnya berdasarkan hukum Al-Quran melalui sebuah dewan yang disebut *panchayat* dalam bahasa Tibet dan *panj* dalam bahasa Urdu. Istilah *panj* yang berarti lima, berasal dari dewan yang beranggotakan lima orang. Anggota dari komite yang terpilih, salah satu diantaranya harus menjadi pemimpin yang dikenal dengan sebutan *Mia* di kalangan muslim dan Khache Go pa di kalangan orang Tibet salah satu tokoh Khache Go Pa yaitu Haji Habibullah Shamo (Gaute, 2015).

Khache Go pa memiliki hubungan kontak dengan pihak berwenang Tibet, selain bertugas sebagai pemimpin *panchayat* (dewan lima), Khache Go pa juga bertugas mengadili semua pelanggaran yang dilakukan Khache

dan memberi nasihat kepada masyarakat muslim sesuai dengan hukum Al-Qur'an (Jest, 1995).

Tibet dengan masyarakatnya yang mayoritas beragama Buddha, ada pembatasan konsumsi daging selama satu bulan dalam setahun atau selama bulan suci Buddha Saga Dawa atau festival doa besar yang diadakan pada awal bulan lunar namun untuk muslim Tibet dikecualikan dari pembatasan ini. Muslim Tibet bebas membuka toko dan berdagang bahkan mereka dibebaskan dari pajak perdagangan oleh pemerintah Tibet sehingga memungkinkan mereka menggunakan kelebihan pendapatannya untuk kesejahteraan komunitas. Mereka juga tidak diwajibkan untuk menurunkan topi kepada para imam besar selama periode khusus tahunan ketika mereka memerintah yaitu setiap tahun selama 20 hari. Penduduk Tibet juga sangat toleran terhadap suara azan subuh pada bulan Ramadhan. Koneksi-koneksi diberikan kepada muslim Tibet oleh Dalai Lama Kelima dibuat secara tertulis dan berlanjut hingga berkuasanya Tiongkok di Tibet.

Sebagai umat Islam, mereka menguburkan jenazahnya ketika ada yang meninggal dan bukan mengkremasinya. Muslim Tibet memiliki dua tempat pemakaman yang berada di Kyangdugan dan Kygasha. Pemakaman di Kyangdugan berjarak 12 km di luar ibu kota Lhasa, luasnya hampir 2 km². Sebagian dari area pemakaman ini diubah menjadi sebuah taman, digunakan sebagai tempat komunitas muslim biasa menyelenggarakan perkumpulan antar muslim Tibet. Pemakaman di

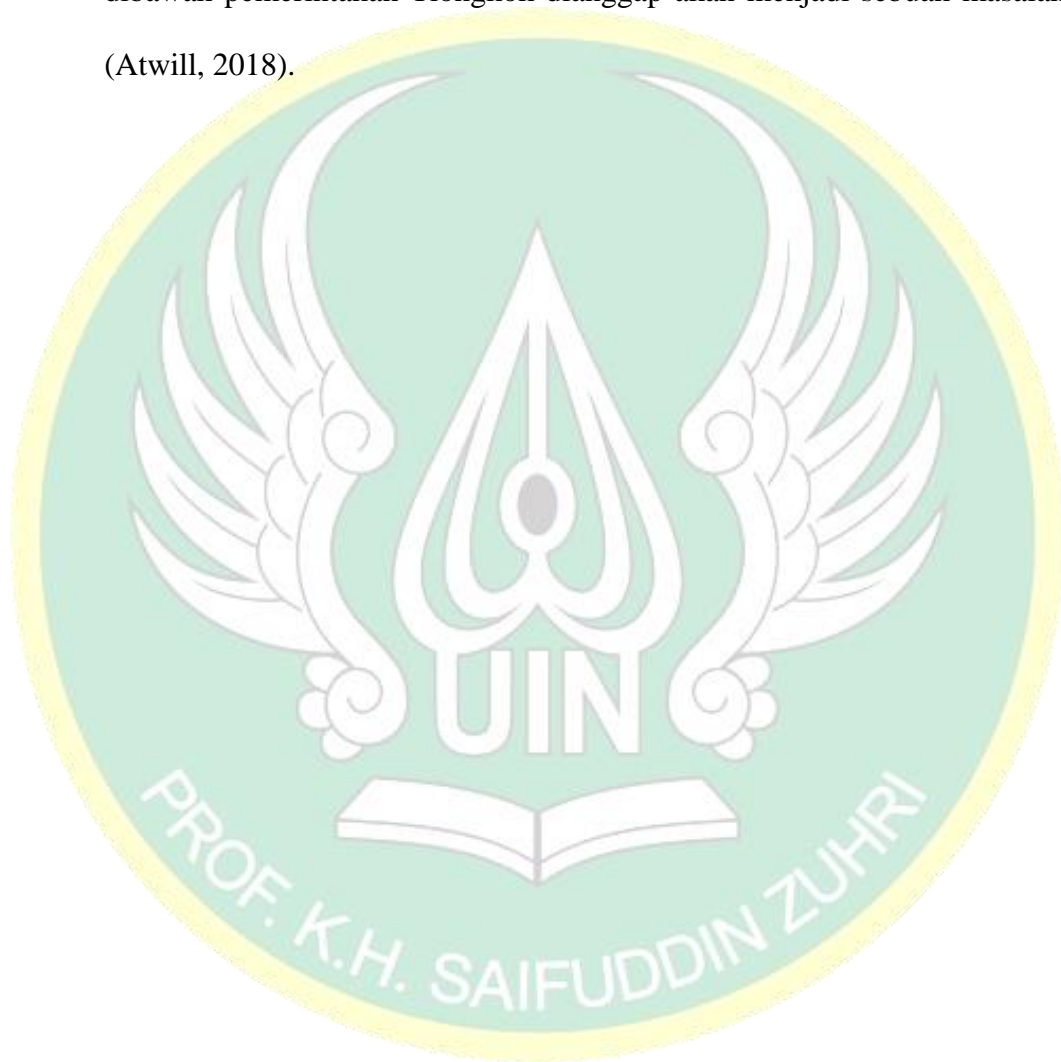
Kygasha berjarak 15 km di luar ibukota dengan area seluas 1/2 km², dimana mayoritas penduduknya beragama Islam yang berasal dari China dan mereka biasa menguburkan orang yang sudah meninggal (Siddiqui, 1991).

Menurut Amir Uddin Nadwi, tanah pemakaman Khache berfungsi sebagai ruang suci yang sangat penting karena di pemakaman tersebut berisi makam orang-orang suci Sufi. Pada hari raya Idul Adha, sejak pagi orang-orang akan mengunjungi untuk membacakan *fateha* dan disana para pengunjung akan disediakan makanan oleh komite muslim, acara ini disebut dengan *Urs* (Singh, 2015).

Setiap tahun pemerintah Tibet memberikan sumbangan kepada muslim Tibet dan keluarga yang membutuhkan. Di bawah pemerintahan Dalai Lama ke-13 Thupten Gyatso (1876-1933), pemerintah menetapkan peraturan mengenai hak dan kewajiban Khache. Khache merupakan bagian dari Sunni dan menjalankan kewajiban agama seperti salat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, merayakan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha serta ziarah dan menunaikan ibadah Haji ke Mekkah.

Dalam kesehariannya, muslim Tibet biasa mengajarkan bacaan Al-Qur'an dan memberikan pengetahuan dasar tentang Islam. Komunitas Khache juga mendirikan dua madrasah (sekolah Islam) di Lhasa dan satu di Shigatse untuk mengajarkan bahasa Urdu dasar, pengetahuan Al-quran dan tata cara melaksanakan salat. Mereka juga menggunakan bahasa Urdu sebagai bagian dari silabus di sekolah (Gaute, 2015).

Setelah kedatangan Tiongkok di Tibet pada tahun 1952, dua sekolah dasar didirikan, satu sekolah Tibet dan satu lagi sekolah Tiongkok. Pendidikan agama tetap diberikan kepada siswa muslim, meskipun pada awalnya kehadiran Islam di sekolah-sekolah umum pertama di Lhasa sejak dibawah pemerintahan Tiongkok dianggap akan menjadi sebuah masalah (Atwill, 2018).



BAB III

DAMPAK KONFLIK DIPLOMATIK TIONGKOK-INDIA TERHADAP DINAMIKA SOSIAL MINORITAS MUSLIM TIBET (1959-1980)

A. Konflik Tiongkok-Tibet

Berdirinya Republik Rakyat Tiongkok tidak lepas dari terjadinya revolusi Tiongkok yang berlangsung dari tahun 1911 sampai tahun 1949. Revolusi ini dimulai dengan pemberontakan Wucheng pada tanggal 10 Oktober 1911 dan berhasil merebut kota Wucheng dari kekuasaan Qing. Pada tanggal 12 Oktober 1911, 18 provinsi telah menyatakan kemerdekaan dari kekuasaan Qing dan bergabung dengan Republik Tiongkok. Sun Yat Sen kemudian diangkat sebagai presiden sementara Republik Tiongkok pada tanggal 1 Januari 1912 (Rustamana et al., 2023).

Pada tanggal 12 Maret 1912, Republik Tiongkok, kedudukan Sun Yat Sen sebagai presiden segera digantikan oleh Yuan Shih Kai yaitu Seorang panglima perang yang sangat berpengaruh. Setelah diangkatnya Yuan Shih Kai, Sun Yat Sen pergi ke Kanton dan mendirikan Partai Kuomintang (Komunis). Sun Yat Sen kembali menjabat sebagai presiden sampai tahun 1925, setelah ia wafat kepemimpinan digantikan oleh Jenderal Chiang Kai Shek. Setelah berhasil menggulingkan Kuomintang, pada 1 Oktober 1949 Partai Komunis Tiongkok memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok yang beribukotakan di Beijing (Oleh, 2010).

Setelah RRT berkuasa membuat mereka mendesak Tibet untuk bernegosiasi terkait status kebebasan Tibet. Masyarakat Tibet yang merasa

bahwa Tibet telah merdeka selama berabad-abad jelas menentang keinginan Mao. Pada 1 Oktober 1949, melalui radio Beijing Tiongkok menyatakan akan mengirim tentara pembebasan rakyat untuk melakukan pembebasan wilayah Tiongkok termasuk Tibet dari negara asing. Sebagai tanggapan dari pengumuman tersebut, Tibet yang merasa wilayah mereka tidak pernah diambil oleh negara asing kemudian menulis surat untuk Mao. Sementara itu, tentara pembebasan rakyat sudah mulai di kirim oleh Mao ke wilayah Tibet Timur yaitu Chamdo dan mengedarkan dokumen berisi 10 poin, meminta rakyat Tibet untuk bekerja sama dengan Tiongkok untuk membebaskan Tibet dari imperialis asing.

Adanya dokumen 10 poin yang dibuat oleh Tiongkok, membuat pemerintah Tibet memutuskan untuk mengirim delegasi yang terdiri dari dua orang senior dan lima asistennya untuk berdiskusi dengan RRT. Dalam perundingan tersebut, Tiongkok melalui perdana menternya menuntut delegasi Tibet untuk menerima tiga poin yaitu pertama, Tibet diakui sebagai bagian dari Tiongkok, kedua, pertahanan nasional Tibet akan ditangani pemerintah Tiongkok, ketiga, hubungan politik dan perdagangan Tibet dengan negara-negara asing harus dilakukan melalui Tiongkok. Pemerintah Tibet kemudian menginstruksikan para delegasinya untuk menolak usulan Tibet terutama pada poin pertama, sehingga sementara perundingan tersebut dihentikan. Akibat diberhentikannya perundingan dari pihak Tibet membuat Tiongkok memulai serangan

militernya ke wilayah Chamdo dan mengakibatkan Chamdo jatuh ke tangan Tiongkok.

Jatuhnya wilayah Chamdo ke tangan Tiongkok, membuat Majelis Nasional Tibet kemudian mengadakan sidang darurat dan meminta Dalai Lama ke-14 yang pada saat itu baru berusia 15 tahun untuk mengambil alih kekuasaan penuh sebagai kepala negara dan memindahkan pemerintahannya untuk sementara ke Dromo (Yatung) dekat perbatasan India, agar jika nantinya ada bahaya Dalai Lama bisa mudah untuk pergi. Pada tanggal 17 November 1950, mengambil alih kekuasaan dalam upacara resmi penobatannya sebagai kepala negara Tibet. Dalai Lama ke-14 kemudian menulis surat kepada Mao bahwa “hubungan Tibet dan Tiongkok telah memburuk selama saya masih menjadi minoritas, dan setelah sekarang saya sudah mengambil alih tanggung jawab, saya ingin menghidupkan kembali hubungan harmonis antara Tiongkok-Tibet”. Ia juga ingin Tiongkok membebaskan tawanan perang dan menarik pasukan tentara Tiongkok dari Tibet (Promisies and Lies The 17 Point Agreement, n.d.).

Perundingan ulang dilakukan di Chamdo dengan Tiongkok yang di wakikan oleh Ngabo Ngawang Jigme sebagai negosiator dan pemimpin delegasi menyampaikan isi surat kepada Tiongkok yang berisi lima poin agenda perundingan. Pihak Tiongkok menanggapi isi surat dengan pernyataan lima poin mereka sendiri. Karena kedua posisi kedua pihak yang sangat berbeda, jelas tidak ada gunanya melanjutkan perundingan di

Chamdo. Ngabo meminta Tiongkok memindahkan tempat perundingan ke Lhasa atau Beijing yang kemudian disetujui oleh dua pihak bahwa tempat yang digunakan adalah di Beijing.



Gambar 4.4 Penandatanganan perjanjian 17 poin antara delegasi Tibet dan Tiongkok. Sumber: <https://www.tibetjournal.com/the-17-point-agreement-the-last-historical-symbolic-of-tibets-independence/>

Pada tanggal 21 Mei, Tiongkok menyelesaikan rancangan perjanjian utama dan dokumen rahasia tujuh poin yang terpisah. Perjanjian utamanya kurang lebih sama dengan dokumen 10 poin yang diusulkan di awal. Isi dari 17 poin dan pembukaan yang panjang mengklaim kedaulatan Tiongkok atas Tibet. Setelah terjadi perundingan panjang, akhirnya pada 23 Mei 1951 membuat Tibet memutuskan mengirim delegasi untuk menandatangani perjanjian 17 poin atau perjanjian tentang tindakan untuk pembebasan Tibet secara damai yang telah disetujui oleh kedua pihak.

Konflik Tiongkok-Tibet telah berkembang sejak terbentuknya Republik Rakyat Tiongkok dan terus berlanjut hingga sekarang. Konflik ini melibatkan berbagai persoalan seperti terkait kedaulatan negara, pelanggaran Hak Asasi Manusia, asimilasi budaya, marginalisasi ekonomi,

pemukiman kembali penduduk pedesaan Tibet secara paksa. Menurut Dawa Norbu dalam bukunya, salah satu landasan konflik Tiongkok-Tibet adalah konflik etnis yang di dominasi oleh faktor sosial politik dan telah memicu krisis legitimasi yang parah bagi pemerintah Tiongkok atas penduduk Tibet (Tsering, 2017).

Sejak masa pemerintahan Mao yang telah mengatakan bahwa Tibet adalah bagian integral Tiongkok sejak abad ke-13, pernyataan tersebut jelas menimbulkan kontradiksi. Pada awalnya, sistem komunis Mao berusaha menghapus masyarakat tradisional Tibet yang selama berabad-abad telah terikat dengan identitas budaya Tibet. Tiongkok menawarkan solusi yang sama di wilayah Tibet seperti halnya pemindahan penduduk Han ke wilayah minoritas, namun masyarakat Tibet menolak kebijakan tersebut dengan cara melakukan berbagai protes.

B. Insiden 1959

Tiongkok telah melakukan dua kali percobaan untuk menjalankan pemerintahan langsung di Tibet. Upaya pertama, dilakukan pada tahun 1910-1912, namun gagal setelah terjadi pertempuran dengan Tibet selama periode tersebut. Upaya kedua pendudukan Tibet dilakukan pada tahun 1950 dan berhasil melakukan pendudukan di Tibet dengan dikuasainya ibukota Tibet yaitu Lhasa yang kemudian menimbulkan pemberontakan dari masyarakat Tibet dengan puncak perlawanan terjadi pada tahun 1959 (Aiqani, 2018)

Sejarah lisan menunjukkan bahwa otonomi Tibet di berbagai bidang kehidupan masih bertahan hingga pertengahan 1950-an. Kalender sosial Lhasa, ritual Buddha Tibet, dan aliran peziarah, kegiatan-kegiatan tersebut sebagian besar berjalan tanpa henti. Selain kegiatan-kegiatan rutin yang masih berjalan, *Kashag* (dewan pemerintahan Tibet) dan biara-biara juga masih bertahan secara kelembagaan. Dalai Lama masih menjalankan peran sentralnya dalam kehidupan kelembagaan dan budaya Tibet sembari berperan sebagai mediator antara kendali Tiongkok dan otoritas Tibet. Era Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang menguasai Tibet, menjadikan Tibet satu-satunya wilayah administratif dibawahnya yang menggunakan Dolar perak Tiongkok sebagai alat pembayaran yang sah dan tidak menggunakan uang rakyat sebagai mata uang utamanya (Atwill, 2018).

Serangkaian peristiwa yang terjadi pada musim semi tahun 1951 yang akan menentukan arah politik Tibet untuk dekade selanjutnya. Pemerintah India, Inggris, dan AS pada bulan-bulan awal tahun 1951 setelah bertahun-tahun memberikan janji dukungan yang tidak jelas, memberi isyarat bahwa mereka tidak akan bersedia membela Tibet dari invasi Tiongkok atau bahkan memberikan tempat yang aman bagi pemerintahan Dalai Lama. Karena melihat tidak ada alternatif lain, pejabat pemerintahan Tibet bertemu dengan pejabat dari pemerintah Tiongkok pada tanggal 23 Mei 1951 dan menandatangani perjanjian 17 Poin untuk pembebasan damai Tibet. Perjanjian tersebut menegaskan kedaulatan

Tiongkok atas Tibet, meskipun dalam perjanjian tersebut menyatakan tidak akan mengubah sistem politik yang ada di Tibet (Atwill, 2018).

Sebagai hasil dari perjanjian 17 poin yang ditandatangani pada tahun 1951, para pedagang masih diizinkan mengimpor barang-barang dari India yang langka, sangat mahal atau bahkan dilarang di wilayah lain di Tiongkok. Selain itu, barang-barang mewah tetap diberlakukan bebas pajak atau dikenakan pajak dengan tarif yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota pedalaman Tiongkok lainnya.

Pada akhir tahun 1951, lebih dari 8000 tentara Tiongkok berada di Lhasa dan menandai era baru ibu kota Tibet. Pada saat itu, Lhasa menjadi kota yang berada pada fase awal pendudukan oleh politik baru yang penuh kontradiksi, intrik politik, dan bentrokan budaya. Pemerintah Tiongkok yang di pimpin oleh Mao Zedong, melakukan pendekatan bertahap dalam proses menguasai sepenuhnya wilayah Tibet. Walaupun pemerintah Tiongkok mengatakan bahwa kedatangan mereka bukan untuk menindas dan mengeksploitasi masyarakat Tibet, namun pasca tahun 1951 sering ditampilkan sebagai kasus penindasan dan perlawanan Tibet.

Pada tahun 1956, ketika pemerintah di Tibet mulai memberlakukan peraturan yang diprakarsai oleh perjanjian dengan India dan Nepal, paspor mulai diwajibkan untuk digunakan ketika meninggalkan atau memasuki perbatasan Tibet dengan India dan Nepal. Sebelumnya, persyaratan seperti itu jarang diberlakukan. Karena peraturan tersebut, konsulat India di Lhasa mengalami peningkatan permintaan visa sebesar 400 persen dari tahun ke

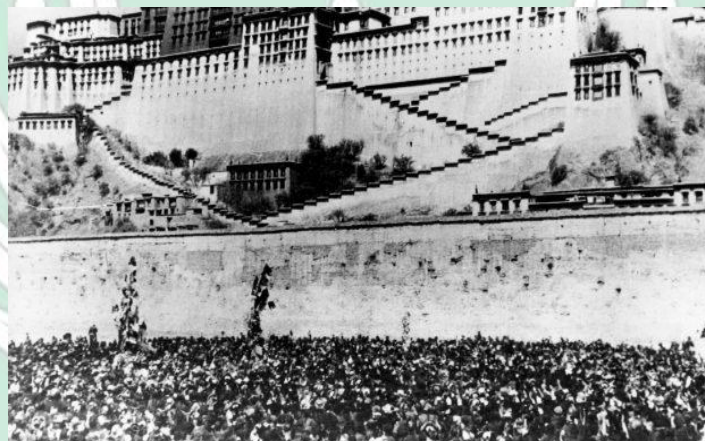
tahun antara tahun 1955 dan 1956. Sebelum terjadi perpindahan kewarganegaraan semakin banyak, orang Nepal yang tinggal di Lhasa mereka diberi pilihan untuk menentukan kewarganegaraan mereka. Hal ini dijanjikan oleh Tiongkok pada tahun 1959 yang bersikeras akan memberikan paspor Tiongkok kepada mereka terlebih dahulu (Atwill, 2018).

Hubungan antara para pemimpin Tibet dan Tiongkok akhirnya memburuk dikarenakan berbagai alasan seperti tekanan ekonomi yang dialami warga Tibet akibat kehadiran pasukan tentara pembebasan rakyat, visi yang saling bertentangan tentang masyarakat Tibet, pecahnya pemberontakan Kham dan Amdo dan ketakutan terus menerus warga Tibet terhadap ideologi antiagama yang diterapkan oleh pemerintahan Mao dan partai komunis Tiongkok (Singh, 2015).

Pada bulan Januari 1959, Mao Zedong dalam perkataannya bahwa wilayah Tibet tidak dapat dihindari akan timbul pertikaian besar antara pihak Tibet dengan Tiongkok. Di sekeliling kota Lhasa, Tiongkok mulai membangun menara pengawas di persimpangan dan titik-titik strategis lainnya, benteng di dirikan di atas bangunan tempat tinggal orang Tionghoa yang bekerja atau tinggal disana. Tiongkok menjadi sangat sibuk memperkuat pertahanan, mereka bahkan meminta bantuan warga sipil dari semua kalangan untuk ikut membantu (Atwill, 2018).

Bersamaan dengan persiapan pertahanan ini, para pejabat Tiongkok juga mulai memberikan tekanan terhadap *Kashag* untuk

mengusir *Khampa* yang datang dari Tibet Timur yang dianggap merusak stabilitas kota. Namun, kelambanan Kashag terhadap permasalahan ini memperburuk situasi. Spekulasi mengenai penguatan pasukan Tiongkok dan meningkatnya rumor yang menyatakan rencana Tiongkok akan menangkap Dalai Lama ke-14 semakin memperburuk suasana yang terjadi di Lhasa. Pemberontakan melawan Tiongkok yang dimulai pada tanggal 10 Maret 1959, membuat umat Islam di Tibet juga memutuskan untuk ikut bertindak (Gaute, 2015).



Gambar 5.5. Para perempuan mengikuti pemberontakan tahun 1959.
Sumber: <https://freetibet.org/freedom-for-tibet/tibetan-resistance/tibetan-uprising-1959/>

Di tengah banyaknya tuduhan dan penolakan antara otoritas Tibet dan Tiongkok, demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh warga Tibet. Baik dari pihak masyarakat Tibet maupun Tiongkok seperti sudah berada di akhir kesabaran mereka. Pihak Tibet mulai dari pejabat, biksu, kepala biara, masyarakat dari berbagai kalangan dan beberapa ribu perempuan mulai mengorganisir diri mereka sendiri untuk melawan Tiongkok (Siddiqui, 1991).

Pada tanggal 12 Maret 1959, tentara Tiongkok atas perintah Mao dan Chou En Lai, bergerak menuju Lhasa. Ketika mereka mencapai biara Drepung yang terdapat 7.700 biksu dan biara Sera dengan 3.300 biksu, mereka menghadapi pemberontakan (Siddiqui,1991). Masyarakat Tibet kemudian berbaris menuju Lhasa untuk menyelamatkan Dalai Lama ke-14 dan juga ibukota mereka. Meskipun sebagian besar mereka yang berkumpul di sana tidak terlatih berperang dan juga tidak bersenjata.

Akhirnya, Dalai Lama ke-14 dan penasihat terdekatnya karena tidak mampu memahami niat Tiongkok dan takut akan kekhawatiran publik atas kemungkinan dia diculik atas perintah *Kashag* kemudian pergi meninggalkan Lhasa pada tanggal 17 Maret 1959, melintasi Himalaya dan tiba di India dua minggu kemudian. Pada tanggal 19 Maret, ketika berita kepergian Dalai Lama ke-14 diketahui masyarakat Tibet dan Tiongkok yang sudah tegang, marah, dan curiga satu sama lain memulai pertarungan sengit untuk menguasai kota tersebut. Pertempuran yang terjadi pada Pemberontakan Maret 1959 digambarkan terutama dalam literatur Anglo-Eropa sebagai perlawanan Tibet dan penindasan Tiongkok. Kemarahan besar yang ditujukan masyarakat Tibet terhadap elit penguasa Tibet yang mereka yakini telah mengkhianati Dalai Lama (Atwill, 2018).

Masyarakat Tibet selain berjuang dengan melakukan perlawanan kepada tentara Tiongkok, mereka juga menunjukkan kemarahan kepada orang-orang Tibet atau para elit pemerintah Tibet yang mereka curigai sebagai pro Tiongkok. Terdapat dua orang yang diduga pro Tiongkok

akibat mereka berpakaian yang menyerupai orang-orang Tiongkok (Atwill, 2018).

Orang pertama yang diserang adalah Sampho yang pada saat itu mengenakan pakaian ala Tiongkok dibandingkan pakaian Tibet. Dia adalah anggota delegasi asli Tibet yang pada tahun 1951 menyetujui Perjanjian 17 Poin yang semakin tidak populer yang menyebabkan kendali Tiongkok atas Tibet. Pada saat serangannya tahun 1959, Sampho merangkap jabatan sebagai panglima tertinggi Angkatan Darat Tibet dan sebagai wakil komandan Komando Militer PLA Tibet. Orang berikutnya yang diserang adalah anggota terkemuka Komite Pembebasan Chamdo, Khunchung Sonam Gyamtso. Dia memasuki Istana Norbulingka dengan mengenakan pakaian tradisional Tibet tetapi kemudian keluar dengan mengenakan celana panjang, kemeja putih, dan masker bedah putih yang menutupi pakaian wajahnya yang biasa dikenakan oleh orang Tiongkok (Atwill, 2018).

Pada tanggal 20 Maret 1959 suasana Tibet dimulai dengan sangat berbeda. Pemberontak Tibet mengambil posisi bertahan di berbagai titik di seluruh kota dan kekerasan kini dengan sengaja menargetkan pasukan militer Tiongkok dan gedung-gedung pemerintah, bentrokan meletus di seluruh kota. Bentrokan berdarah khususnya terjadi di sebelah barat Lhasa di sekitar Istana Musim Panas Norbulingka dan Istana Potala, ketika masyarakat Tibet berjuang untuk mempertahankan *landmark* penting Lhasa dan mengusir serangan militer Tiongkok. Mengingat kekuatan

senjata yang luar biasa dari pasukan Tiongkok yang terlatih, peluang dari pihak Tibet untuk berhasil mengalahkan pasukan Tiongkok sangatlah kecil.

Dalam waktu 24 jam bendera Tiongkok berhasil berkibar di atas Istana Potala, tentara Tiongkok dan Tibet tewas berserakan di jalan-jalan dan hampir seluruh perlawanan Tibet telah melemah. Sebagai hasilnya, banyak warga Lhasa memutuskan untuk mengikuti Dalai Lama ke-14 melintasi Himalaya hingga India. Selain itu, pada bentrokan 20 Maret 1959, hal yang jarang diutarakan adalah ada kelompok yang menyerang Wapaling Khache di tepi tenggara Lhasa.

Serangan yang dilakukan terhadap Wapaling Khache berbeda dengan serangan yang didapatkan warga Tibet karena kekerasan yang ditujukan kepada mereka mengakibatkan hancurnya rumah, tempat ibadah, dan harta benda pribadi. Masjid Agung yang berusia berabad-abad dan beberapa lusin tempat tinggal Wapaling Khache dibakar habis. Rumah-rumah dan toko-toko Wapaling Khache di sepanjang jalan pasar dijarah dan digeledah (Atwill, 2018).

Dalam beberapa minggu setelah pemberontakan, banyak pemimpin Tibet yang ditangkap dipenjara dan sering dikritik secara terbuka atas kejahatan mereka selama wajib publik demonstrasi. Seluruh warga Lhasa diharapkan menunjukkan dukungannya terhadap Tiongkok dengan ikut menghina, meludahi dan dalam beberapa kasus memukuli para mantan pemimpin. Dalam satu kasus, pihak berwenang Tiongkok memilih

Ghulam Muhammad, Seorang Wapaling Khache yang terkenal untuk dikritik secara terbuka seorang warga Tibet yang dituduh melakukan kejahatan terhadap negara (Atwill, 2018).

Muslim Tibet yang juga menjadi bagian dari masyarakat Tibet menjadi khawatir dengan kemenangan Tiongkok. Mereka menyadari bahwa tinggal di Tibet berarti menerima rezim yang bisa bersikap sangat ramah terhadap mereka namun tidak terhadap agama mereka. Mereka menyadari konsekuensi jika tetap tinggal di bawah pemerintahan Tiongkok yaitu kehilangan generasi masa depan dan kebebasan beragama. Alasan utama mereka bermigrasi ke India karena itu adalah rumah leluhur mereka, namun yang lebih penting mereka akan mempunyai akses terhadap institusi keagamaan dan perguruan tinggi di India dan yakin dapat mewariskan warisan agama kepada generasi berikutnya. Mereka kemudian melintasi perbatasan dan memasuki India pada akhir tahun 1959.

Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah Tibet selalu memperlakukan mereka sebagai warga Tibet Tionghoa. Mereka tidak pernah mengeluh mengenai status dan perlakuan mereka sebagai warga Tiongkok atau mengajukan permohonan penarikan kewarganegaraan Tiongkok. Setelah pemberontakan di Tibet berhasil dipadamkan, pemerintah India kemudian ikut membela muslim Tibet dan mengklaim muslim Tibet adalah warga negara India terutama setelah muslim Tibet mengirim delegasi ke kedutaan besar India untuk meminta

bantuan dan menyampaikan pernyataan bahwa mereka berasal dari Khasmir yang berarti adalah bagian dari warga negara India. Konsulat Jenderal India di Lhasa, tanpa izin dari otoritas lokal Tibet mendistribusikan formulir permohonan kewarganegaraan India kepada Muslim Tibet. Hal ini tentu saja dianggap sebagai tindakan yang paling tidak ramah dan terkesan ikut campur oleh pemerintah Tiongkok.

Ketika perdana menteri India, Jawaharlal Nehru mengizinkan muslim Tibet untuk bermigrasi ke India, sebelum hal itu terjadi Tiongkok yang sedari awal membantah klaim muslim Tibet mengenai asal mereka dari Khasmir kemudian melakukan serangkaian serangan kepada muslim Tibet seperti mereka dikenakan berbagai pajak, banyak harta benda yang disita dan para pemimpin muslim Tibet dijatuhi hukuman penjara seumur hidup (Shah, 2012).

Pada tahun 1959 setelah menyeberang ke kota perbatasan Kalimpong, Darjeeling, dan Gangtok para pengungsi muslim Tibet yang tersebar mengalami dilema dalam memilih antara menetap di Kashmir, tanah air leluhur mereka sebagai orang India atau mengikuti pengungsi Tibet lainnya di bawah kepemimpinan dari Dalai Lama. Para tetua muslim Tibet dengan tepat memilih Kashmir dan melihat cukup sarana dan alasan untuk menetap dan hidup diantara masyarakat Khasmir. Setelah keputusan tersebut, kelompok muslim Tibet pindah ke Srinagar, Kashmir pada tahun 1961-1964 (Siddiqui, 1991).

C. Konflik Diplomatik Tiongkok-India Terhadap Muslim Tibet

Dalam pandangan identitas nasional Tibet, Khache merupakan subjek penting di bawah pemerintahan Istana Ganden sejak awal didirikan oleh Dalai Lama kelima. Hidup dengan dukungan dari otoritas pusat Tibet menjadikan Khache sebagai komunitas kaya yang berkontribusi pada pembangunan budaya dan ekonomi Lhasa. Dengan diberikannya kebebasan menjalankan agama dan tradisi Islam seperti dapat mendirikan masjid dan madrasah di kota, membuat Khache menganggap Tibet sebagai tanah air mereka sendiri sama seperti masyarakat Tibet umumnya. Masalah kewarganegaraan sudah tidak bermasalah lagi bagi Khache (Singh, 2015).

Namun setelah penggulingan Lhasa oleh pasukan Tiongkok dan kekacauan tahun 1959, membuat Khache kemudian memikirkan kembali identitas nasional mereka. Keadaan memaksa mereka untuk memilih antara menyatakan identitas nasional Tibet atau memilih kewarganegaraan India atas dasar keturunan Khasmir mereka. Di bawah kepemimpinan Tiongkok, membuat Khache melihat kembali pilihan kewarganegaraan mereka sebagai hal yang penting untuk melestarikan identitas muslim mereka. Terutama setelah kepergian Dalai Lama ke-14 dari Tibet, mereka memilih untuk ikut meninggalkan Lhasa sebagai tanggapan terhadap kebijakan Tiongkok (Singh, 2015).

Pada awal pendudukan Tiongkok di Tibet sebutan etnis, identitas dan keturunan campuran di Tibet jarang diterapkan dan dipahami dengan

baik oleh pemerintah Tiongkok. Kategori-kategori tersebut kemudian diatur oleh pemerintah Tiongkok dan transisi ini terjadi antara tahun 1957 dan 1959 tanpa mekanisme tertentu dalam mengidentifikasi kelompok-kelompok yang cocok dengan kategori nasional yang telah ditetapkan (Atwill, 2018).

Adanya kebijakan tentang kewarganegaraan, pejabat Tiongkok yang sangat sensitif terhadap pernyataan bahwa Tibet dan warga Tibet bukan bagian dari Tiongkok membuat pihak Tiongkok menyatakan bahwa seseorang yang dapat membuktikan identitas asingnya (tempat kelahiran) maka akan diperlakukan sebagai orang Tiongkok. Di Tibet, jika memiliki keturunan asing tetapi pernah tinggal di sana, dianggap sebagai orang Tiongkok, namun jika baru saja tiba dari negara asing barulah mungkin dianggap orang asing.

Pada masa pemerintahan Mao Zedong, dakwah agama dilarang dan hukum yang keras diberlakukan. Melihat perlakuan tersebut, para pemimpin muslim Tibet pertama kali menghubungi otoritas lokal dan mengkalim bahwa secara historis mereka berasal dari Khasmir dan karena itulah mereka merupakan warga negara India. Awalnya, otoritas Tiongkok membantah klaim mereka dengan alasan kurangnya bukti substantif. Kebijakan inilah yang kemudian membuat muslim Tibet akhirnya mengajukan permintaan ke Kedutaan Besar India di Tibet mengenai asal mereka dari Kashmir (Barq, 2013).

Pernyataan mengenai apakah Barkor Khache adalah orang Tibet atau orang Tiongkok mendominasi wacana di Lhasa, maka di India pernyataan ini berpusat apakah mereka harus dianggap sebagai warga Kasmir atau warga India. Dari sudut pandang Tiongkok, semua muslim di Tibet baik itu Barkor Khache, Wapaling Khache atau muslim dari Beijing yang tinggal di Tibet, semuanya adalah orang Hui dan tanpa kecuali dianggap sebagai warga negara Tiongkok (Atwill, 2018).

Mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Tiongkok mengenai identitas dan kewarganegaraan Barkor Khache yang mengajukan permintaan mengenai asal mereka dari Kasmir. Klaim tersebut tidak akan disahkan oleh Tiongkok, karena mereka sudah lama tinggal di Tibet dan sudah dianggap menjadi bagian dari Tibet. Kecuali jika mereka dapat membuktikan identitas tempat kelahirannya yaitu di Kasmir maka permintaan mereka untuk berpindah ke India mungkin akan diproses oleh pemerintah Tiongkok.

Awalnya Barkor Khache mengumpulkan bukti sejarah untuk memaparkan kasus mereka sebaik mungkin meskipun bukti yang mereka pilih bersifat selektif, terpisah-pisah atau sengaja diambil di luar konteks. Dalam upaya membuktikan bahwa mereka adalah orang asing bukan sekadar keturunan asing, mereka sering kali dengan sengaja menyamakan pendapat mereka dengan pendapat masyarakat Ladakhi yaitu dengan menggunakan terminologi Khache atau Kashmir. Mengingat status jelas mereka sebagai orang Tibet sebelum tahun 1951, Barkor Khache

tampaknya tidak yakin tentang cara terbaik untuk membuktikan keturunan India mereka.

Yusuf Naik seorang Barkor Khache mengatakan saat itu Barkor Khache memutuskan menunjukkan nama muslim dan Khasmir mereka untuk menjauhkan diri dari asumsi sebagai orang Tibet. Karena Tiongkok tidak setuju dengan alasan pertama mereka dan membutuhkan bukti asal mereka dari Khasmir, maka Barkor Khache kemudian menggunakan nama latar belakang keluarga mereka yaitu Butt dan Naik yang jelas tidak ada di Tibet atau Tiongkok, namun jika datang ke Khasmir maka akan menemukan banyak nama Butt dan Naik. Melalui nama keluarga mereka yang umum di India utara dan berpendapat bahwa ras mereka pada dasarnya adalah Khasmir. Mereka tinggal di Tibet sebagai warga negara India yang hanya untuk tujuan perdagangan. Terlepas dari lamanya mereka tinggal di Tibet, garis keturunan dari ayah mereka masih menghubungkan dengan Khasmir dan mereka memiliki hak sebagai warga negara India. Dalih ini juga diperkuat dengan mereka yang diberlakukan bebas pajak yang diperintahkan sendiri oleh dewan Tibet (Singh, 2015).

Dari pihak Tiongkok tidak secara langsung menyangkal argumen Barkor Khache, namun mereka hanya menunjukkan bahwa semua argumen yang disampaikan tidak satupun dapat membuktikan secara pasti bahwa mereka bukan orang Tibet. Untuk memverifikasi nenek moyang Kashmir mereka, para pemimpin Barkor Khache diberitahu oleh pihak berwenang Tiongkok bahwa semua klaim kewarganegaraan asing memerlukan bukti

dokumen resmi yang dapat menyatakan bahwa mereka benar-benar berasal dari Khasmir. Tiongkok menganggap upaya Barkor Khache untuk menyatakan diri mereka sebagai orang asing sebagai kegiatan penghasutan dan memenjarakan mereka.

Menjelang tahun 1959 banyak pemimpin komunitas Barkor Khache ditangkap, dituduh berkonspirasi melawan Tiongkok dan menghasut orang-orang melawan penjajahan Tiongkok. Selain itu, salah satu anggota komite *panch*, dipenjarakan oleh Tiongkok atas tuduhan membantu Dalai Lama ke-14 dalam pelariannya dari Tibet. Di antara mereka juga ada Haji Habibullah Shamo yang saat itu merupakan Khache Go pa di komunitas tersebut, sebagian besar tahanan politik ini akhirnya tewas di penjara Tiongkok (Gaute, 2015).

Pada tanggal 21 Maret, Tiongkok menahan dan menangkap Hamidulla Maslie pemimpin senior dewan tradisional Tibet dan dua orang lainnya, mereka berada dipenjara pada akhir tahun. Para pejabat Tiongkok memberitau Barkor Khache bahwa semua undang-undang dan dokumen sebelumnya (mengenai kewarganegaraan India mereka) dianggap dibatalkan dan tidak ada klaim yang dapat diajukan akan diterima kecuali didukung oleh bukti dokumen resmi.

Pada tanggal 1 April, para pejabat Tiongkok mendatangi kediaman dan tempat usaha Barkor Khache untuk menanyakan ras dan kewarganegaraan mereka, sekaligus menuntut agar mereka menyatakan diri sebagai orang Tiongkok. Mereka yang menolak akan dibawa untuk

menjalani interogasi panjang yang mengakibatkan beberapa Barkor Khache dipaksa untuk menyatakan diri mereka sebagai warga negara Tiongkok. Sepanjang periode ini, Barkor Khache dilarang berkumpul dalam kelompok lebih dari tiga orang. Bahkan ketika mereka memperlakukan kewarganegaraan mereka, para pejabat Tiongkok menuntut mereka berpartisipasi dalam berbagai pertemuan indoktrinasi dan propaganda dengan ancaman akan ditahan.

Pada Mei 1959, sekelompok Khache yang akan berangkat haji terdampar di Bombay tanpa dokumen perjalanan internasional. Mereka pergi dari Lhasa sebelum ketegangan politik terjadi dan perjalanan mereka sebagai peziarah sebagaimana yang terjadi bahkan beberapa dekade sebelumnya bahwa mereka diizinkan melintasi perbatasan India dengan catatan sederhana bahwa mereka adalah peziarah yang akan melakukan perjalanan ke Mekkah melalui Bombay. Bombay selama bertahun-tahun berfungsi sebagai pelabuhan keluar yang utama bagi umat Islam yang akan pergi ke Jeddah menggunakan perahu saat beribadah haji ke Mekkah (Atwill, 2018).

Penegakan identitas jamaah haji yang semakin ketat telah dimulai pada masa pemerintahan Inggris tahun 1930-an. Khache yang sebelumnya bisa bebas berpergian haji tanpa dokumen perjalanan internasional mulai diperhatikan oleh India dan jika mereka ketahuan tidak memiliki dokumen tersebut maka mereka akan diberhentikan. Keadaan Khache yang terdampar di Bombay akibat tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Mekkah

membuat mereka pergi ke konsulat Tiongkok di Bombay untuk meminta dokumen perjalanan Internasional, namun pihak Tiongkok menolak memberikan mereka paspor.



Gambar 6.6 Berpergian haji pertama dari Lhasa-Bombay-Jeddah setelah pendudukan Tiongkok tahun 1959. Sumber: <http://www.tibetanuslims.com/old-photos.php>

Melihat foto Khache di surat kabar, Nehru secara pribadi mengangkat masalah ini kepada Menteri Luar Negerinya Subimal Dutt, memintanya untuk membantu mereka. Beberapa hari kemudian Morarji Desai Menteri Keuangan India, diutus untuk menemui mereka di kantor Komite Kesejahteraan Jamaah Haji di Bombay dan memfasilitasi keberangkatan mereka ke Mekkah. Pada awal bulan Juli, Nehru kembali menulis surat kepada Dutt mengenai perilaku Tiongkok yang semakin agresif terhadap pejabat konsulat India dan berlanjutnya pelecehan anti-India di media Tiongkok (Atwill, 2018).

Untuk melawan sikap keras Tiongkok, Barkor Khache meminta bantuan India dengan mengirim delegasi untuk mendatangi kedutaan besar India di Lhasa. Mereka mengajukan banding ke Konsulat Jenderal P. N.

Kaul, menyampaikan dilema mereka kepada pemerintah India. Awalnya India ragu untuk membantu karena khawatir akan menimbulkan ketegangan antara India dengan Tiongkok, namun pemerintah India kemudian mengakui bahwa Barkor Khache berasal dari Khasmir yang memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan India. Kebijakan baru ini diuraikan dalam dokumen penting yang berjudul “Catatan yang diberikan oleh kementerian luar negeri New Delhi kepada kedutaan besar Tiongkok di India, 24 September 1959” yang merupakan bagian dari *White Paper* yang berisi pertukaran pendapat antara pemerintah India dengan Tiongkok antara tahun 1954 dan 1959 (Singh, 2015).

Memorandum khusus ini menyoroti justifikasi pemerintah India untuk menerima Barkor Khache sebagai warga negara dan tanggapan mereka terhadap keberatan pejabat Tiongkok. Dokumen inilah yang kemudian dirujuk oleh para pemimpin Barkor Khache sebagai bukti sejarah untuk melegitimasi klaim mereka sebagai orang Khasmir dan bagian dari warga negara India yang di dalamnya menjelaskan tentang proses di mana Barkor Khache menjadi warga negara India yang dipulangkan. *White Paper* mengidentifikasi tiga kelompok berbeda mengenai “yang tinggal di Tibet pada saat tahun 1959” yang memenuhi syarat untuk kewarganegaraan India berdasarkan Pasal V atau VIII konstitusi India yaitu warga negara India yang terdaftar, Lama Ladakhi, dan muslim asal Khasmir (Singh, 2015).

Namun, pejabat pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa Khache sebenarnya adalah orang Tibet dan karena itulah mereka juga warga negara Tiongkok. Ke-Tibetan mereka dibuktikan oleh berbagai faktor seperti secara historis mereka tunduk pada pengadilan Tibet, anggota *Panch* perlu dikonformasi oleh para pemimpin Buddha di Lhasa, komunitas muslim mengakui kepemimpinan Dalai Lama kelima, Khache berpergian dengan membawa dokumen Tibet dan mereka juga ikut bertempur bersama pasukan Tibet melawan ancaman asing.

Konsulat India menanggapi bahwa pernyataan Tiongkok jelas tidak akan bisa menjadi bukti konklusif mengenai kewarganegaraan Tibet atau Tiongkok dari Khache. Menurut kedutaan besar India, penghormatan Khache terhadap Dalai Lama merupakan pengakuan simbolis atas statusnya sebagai kepala pemerintahan Istana Ganden. Selain itu, setiap transaksi yang mereka lakukan dengan sistem peradilan Tibet merupakan bagian dari kewajiban setiap warga negara India untuk emamtuhi yurisdiksi pemerintah asing tempat mereka tinggal. Khache menerima surat perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tibet hanya untuk kenyamanan. Pejabat India juga mengklaim bahwa selama Khache tinggal Tibet, mereka terus menjalani kehidupan tanpa harus bersusah payah mendaftarkan diri sebagai warga negara India akan tetapi mereka tidak menduga akan ada upaya pemutusan hubungan dengan tanah air mereka secara sewenang-wenang (Singh, 2015).

Dari musim semi hingga akhir musim panas tahun 1959, perselisihan mengenai Barkor Khache tetap berjalan bagi semua pihak yang terlibat yaitu India, Tiongkok, dan Barkor Khache. Perselisihan ini sebagian besar merupakan pengulangan pernyataan sebelumnya tentang (1) status historis Khache di bawah kekuasaan pemerintah Tibet sebelum tahun 1950, (2) badan penerbit paspor atau visa Khache untuk melakukan perjalanan ke Mekah saat menunaikan ibadah haji dan (3) penegasan bahwa istilah Barkor Khache berarti orang Kashmir dengan demikian Barkor Khache harus diadili sebagai warga negara India.

Di tengah pertikaian diplomatik tersebut, otoritas Tiongkok berusaha menghindari pemerintahan India dengan memaksa Khache untuk melepas klaim mereka atas kewarganegaraan India. Dalam *White Paper* menjelaskan beberapa tindakan yang terjadi pada tanggal 14 Juli 1959, Khache yang akan mengirim pernyataan tertulis bersama kepada konsulat jenderal India mengenai tekanan yang diberikan oleh otoritas Tiongkok kepada mereka untuk melepas klaim atas kewarganegaraan India. Para penjaga bersenjata dari pemerintah Tiongkok di gerbang gedung konsulat jenderal India dengan tegas melarang Khache masuk, mereka juga tampaknya mengancam dan mengintimidasi Khache karena tuntutan mereka yang terus menerus. Formulir pendaftaran kewarganegaraan India yang ada di Khache disita oleh otoritas lokal Tiongkok. Tidak ada fasilitas yang diberikan kepada konsulat jenderal India untuk bertemu dengan anggota komunitas India yang ditahan Tiongkok. Khache yang ingin

mencari bantuan kepada mereka juga ditolak oleh otoritas Tiongkok (Singh, 2015).

Pihak berwenang Tiongkok memutuskan bahwa jika India tetap bersikeras memberikan kewarganegaraan kepada Khache dan jika Khache tetap melanjutkan klaim mereka sebagai orang Kasmir yang memiliki hak untuk meninggalkan Tibet, tindakan pemaksaan akan dilakukan Tiongkok dan akan tetap memasukan mereka dalam klasifikasi minoritas nasional Tiongkok.

Pada musim semi tahun 1960, perselisihan antara Tiongkok dan Barkor Khache telah mencapai puncaknya. Setidaknya dua puluh dua orang Barkor Khaches dipenjarakan, mereka berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk melepaskan klaim mereka sebagai orang India. Pihak berwenang Tiongkok tanpa memberikan penjelasan menggeledah delapan tempat tinggal Barkor Khache di tengah malam (Atwill, 2018).

Pada awal April Barkor Khache kembali menghubungi pihak berwenang Tiongkok untuk meminta izin bermigrasi ke India. Pejabat pemerintah menjawab bahwa sebagai warga negara Tiongkok, mereka tidak akan diberikan izin untuk melakukan perjalanan ke India kecuali dengan paspor biasa (Tiongkok) untuk berdagang. Tanggal 13 April, Kementerian Luar Negeri India mengirimkan surat ke Kedutaan Besar Tiongkok di India. Surat ini membahas sikap keras kepala Tiongkok dalam menyelesaikan masalah orang India Kashmir.

Mengutip dari hukum internasional dan opini internasional, catatan India dalam surat tersebut terlebih dahulu membantah tiga pernyataan umum yang berulang kali digunakan oleh Tiongkok untuk menghalangi upaya India memecahkan kebuntuan diplomatik. Pertama, sebagai jawaban atas anggapan Tiongkok bahwa beberapa orang Barkor Khache memegang dokumen Tiongkok, pemerintah India percaya bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Kedua, orang-orang India menyatakan bahwa meskipun Barkor Khache telah berada di Tibet selama lebih dari satu generasi, mereka tetap memiliki identitas terpisah dan tidak ada bukti bahwa mereka secara tegas melepaskan hak mereka atas kewarganegaraan India. Oleh karena itu, tidak adil dan ilegal untuk memaksa orang-orang tersebut mengingat tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka pernah mendapatkan kewarganegaraan Tiongkok.

Ketiga, pemerintah India menyatakan mungkin ada baiknya untuk mengingat kembali Perjanjian antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Indonesia (dalam konferensi Bandung tahun 1955) mengenai masalah kewarganegaraan ganda. Pada intinya perjanjian tersebut menegaskan kewarganegaraan kedua negara penandatangan mempunyai hak untuk memilih sesuai keinginan mereka sendiri kewarganegaraan mana yang ingin mereka pilih (Atwill, 2018). Isi pesan ini kemudian diakhiri dengan pernyataan bahwa daftar muslim Khasmir telah dilengkapi dan dalam semangat persahabatan sesuai dengan hukum dan adat istiadat

internasional, pemerintah Tiongkok akan memfasilitasi pemulangan muslim Kashmir ke India.

Dengan keteguhan Khache yang tetap mempertahankan klaim mereka terhadap kewarganegaraan India dan tekanan diplomatik dari pemerintah India, membuat Tiongkok akhirnya menyetujui perpindahan kewarganegaraan Khache ke India. Pada tahun 1960 dengan dikawal keluar oleh pejabat Tiongkok, beberapa keluarga Barkor Khache diterima oleh pemerintah India di beberapa kota seperti Kalimpong (Singh, 2015).

D. Dampak Konflik terhadap Dinamika Sosial Muslim Tibet

Dampak dari peristiwa yang terjadi pada tahun 1959 di Tibet, membuat muslim Tibet kurang lebih sebanyak 192 keluarga yang tidak yakin akan masa depan mereka di Tibet di bawah pemerintahan Tiongkok kemudian memilih meninggalkan Tibet (Jest, 1995). Pada tahun 1961-1964 banyak muslim Tibet yang migrasi dari Tibet kemudian tinggal di India timur laut terutama di Kalimpong dan secara bertahap pindah ke Srinagar, Kashmir untuk menetap di distrik Idd Gah di mana mereka diberi tempat tinggal oleh Pemerintah India. Pada tahun 1966, mereka resmi diberi kesempatan menjadi warga negara India (Gaute, 2015).

Ketika muslim Tibet pertama kali datang ke Srinagar pada tahun 1961-1964, mereka di arahkan untuk menetap di distrik Idd Gah di kota tersebut. Perumahan dibangun dan disiapkan untuk mereka oleh kepala menteri Bakshi Ghulam Mohamed dengan bantuan keuangan dari pemerintah India. Akan tetapi, perumahan tersebut terbukti memiliki

standar kelas dua dan tidak dapat menampung populasi muslim Tibet yang terus bertambah.

Kesempatan untuk pindah tempat tinggal pertama kali datang di tahun 1975 ketika Dalai Lama ke-14 datang mengunjungi muslim Tibet di Srinagar untuk pertama kalinya. Setelah melihat keadaan mereka di perumahan Idd Gah yang sudah tidak bisa menopang pertumbuhan populasi mereka, Dalai Lama ke-14 berbicara dengan ketua menteri pada saat itu yaitu Sheik Mohammad Abdullah yang kemudian mengizinkan muslim Tibet untuk pindah ke distrik Hawal dan Badamwari yang terletak kira-kira 2 km sebelah timur Idd Gah di bawah bayang-bayang benteng Mughal. Untuk memperbaiki situasi komunitas Khache Dalai Lama ke-14 juga membentuk “Asosiasi Kesejahteraan Pengungsi Muslim Tibet” pada tahun yang sama (Gaute, 2015).

Walaupun relokasi telah dilakukan, bangunan satu lantai di Hawal dan Badamwari terlalu kecil untuk muslim Tibet yang sedang bertumbuh populasinya. Komunitas muslim Tibet yang berada di ketiga lokasi pemukiman terdiri lebih dari 220 keluarga tetapi ditampung di sebidang tanah yang tidak luas dengan rumah-rumah kecil satu lantai yang hampir tidak memiliki halaman dan bahkan terlalu kecil untuk menyediakan akomodasi yang memadai bagi anggota keluarga. Perawatan sanitasi tidak disediakan oleh otoritas kota, saluran air dan jalan juga dalam kondisi rusak (Shah, 2012).

Pada awal kedatangan di Khasmir, muslim Tibet menghadapi masalah dan kesulitan dalam penyelesaiannya seperti masalah tanah, perumahan yang layak, pengangguran, kemiskinan bahkan juga dalam hal budaya dan sosial. Mereka mendapat sterotip negatif, diskriminasi, kelalaian dan ketidaktahuan oleh pemerintah di sana. Namun terlepas dari permasalahan yang mereka dapatkan sejak awal, muslim Tibet terus maju dan berjuang dengan kondisi dan tujuan memperbaiki diri di Khasmir (Shah, 2012).

Komunitas muslim Tibet yang tinggal di Khasmir perlahan mulai membiasakan sebagaimana kehidupan orang Khasmir, mereka mulai belajar bahasa Khasmir serta mengalami mobilitas sosial dalam hal pendidikan, pengembangan budaya, pembangunan ekonomi tetapi tetap dengan mempertahankan dan melestarikan identitas etnis, nasional dan budaya mereka. Di kehidupan sehari-hari, muslim Tibet berinteraksi dengan penduduk asli setempat dan mengembangkan hubungan lebih luas dengan mereka.

Selama dua tahun pertama kehidupan mereka di Khasmir, muslim Tibet berusaha membangun kembali dan mengatur diri mereka sendiri. Kurangnya bimbingan dan kepemimpinan yang tepat menjadi kendala dalam perkembangan mereka di tempat mereka yang baru. Selain itu, perumahan di Idd Gah tidak memadai untuk menampung keluarga yang pasti akan terus bertambah anggotanya. Oleh karena itu, muslim Tibet

mulai menyebar, mereka bermigrasi ke Arab Saudi, Turki, Nepal serta pindah bagian lain India untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Selain permasalahan perumahan yang penduduknya semakin padat, masalah umum yang paling ketara mereka hadapi adalah akibat dari imigrasi mereka, penyesuaian dan pengaturan baru di lingkungan asing. Masalah yang paling utama adalah selama mereka tinggal di sana walaupun sudah menjadi subjek negara India akan tetapi tidak tersedia surat keterangan domisili. Hal ini karena mereka juga tidak memiliki sertifikat penduduk tetap dari pemerintah India. Akibatnya tidak diterimanya status mereka sebagai warga negara yang layak seperti masyarakat Khasmir pada umumnya (Shah, 2012).

Akibat mereka tidak memiliki sertifikat penduduk tetap, banyak pengangguran, kurangnya akses ke pendidikan tinggi, fasilitas publik, fasilitas hukum dan lainnya. Banyaknya pengangguran mengakibatkan mereka menghadapi keterbatasan sumber pendapatan, generasi muda tidak bisa bekerja di departemen pemerintahan dan sektor publik karena kurangnya sertifikat mata pelajaran negara.

Di tempat tinggal muslim Tibet, selain mendapatkan fasilitas berupa perumahan dari pemerinah daerah, mereka juga mulai membangun fasilitas-fasilitas lain seperti sekolah dan masjid. Sekolah umum Tibet di Khasmir dibuka pada tahun 1975 dalam bentuk madrasah yang hanya mengajarkan Al-Qur'an dan bahasa Urdu. Sekolah ini kemudian berkembang dan berbentuk sekolah umum yang dikelola oleh Federasi

Pemuda Muslim Tibet yang juga mengurus pendidikan anak-anak Tibet di sana. Di sekolah ini memiliki total 330 siswa yang terdiri dari sekitar 100 anak Tibet dan sisanya adalah siswa asli Khasmir (Shah, 2012).

Pelestarian budaya, tradisi, dan warisan Tibet merupakan salah satu tujuan utama sekolah ini dan sekitar 40% gurunya berasal dari komunitas Tibet. Identitas Tibet terlihat jelas melalui bendera nasional Tibet, hiasan dinding Tibet, peta dan lainnya. Sekolah ini menjadi sumber lapangan pekerjaan bagi pemuda yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi karena tidak banyak kesempatan kerja yang mereka dapatkan terutama dengan status mereka yang tidak mempunyai sertifikat status penduduk. Dengan berdirinya sekolah ini juga mampu menurunkan angka putus sekolah anak-anak Tibet menjadi nol (Shah, 2012).

Menurut Adfar Shah seorang sosiolog Khasmir menulis tentang kehidupan muslim Tibet selama tinggal di pengungsian. Menurutnya, muslim Tibet mampu mempertahankan identitas sosial, budaya, dan nasional mereka meskipun mereka menetap di lingkungan baru. Pada saat yang sama, mereka juga tidak menghadapi krisis budaya yang besar sembari menyesuaikan diri dan mengadopsi pola hidup mereka sesuai dengan adat istiadat setempat (Barq, 2013).

Muslim Tibet yang tinggal di Khasmir merupakan keturunan dari Barkor Khache yang dahulu tinggal di Lhasa. Pada dasarnya komunitas muslim Tibet yang tinggal di Idd Gah adalah komunitas yang sangat Tibet. Meskipun mereka mengalami pertemuan budaya yang besar selama

tinggal di sana, orang Tibet tetap menggunakan bahasa ibu mereka yaitu bahasa Tibet. Mereka biasa berbicara menggunakan bahasa Tibet ketika di rumah dan saat berinteraksi satu sama lain. Bahkan anak-anak kecil di sana berbicara menggunakan bahasa Tibet Lhasa dan para wanita mengenakan pakaian Chuba Tibet.

Penggunaan bahasa Tibet di antara sesama orang Tibet mencerminkan kecintaan mereka terhadap budaya Tibet. Selain menggunakan bahasa Tibet, anak-anak muda juga belajar dan berbicara menggunakan bahasa Urdu dan bahasa Inggris terutama anak muda terpelajar (Shah, 2012). Muslim Tibet juga mendirikan asosiasi kesejahteraan agar lebih terorganisir dan bisa saling membantu satu lain. Sistem Asosiasi kesejahteraan ini yaitu dengan memilih 10 pengurus yang dipilih setiap tahunnya. Selain itu, asosiasi pemuda Tibet juga terus menjalin hubungan baik dengan kongres pemuda Tibet (Siddiqui, 1991).

Sebagai komunitas muslim, mereka tetap merayakan Idul Fitri dan Idul Adha, mereka juga merayakan hari lahir Dalai Lama sebagai orang yang dihormati mengingat perlakuannya yang adil kepada mereka saat masih tinggal di Tibet. Selain melakukan perayaan keagamaan, dalam hal pernikahan muslim Tibet menikah dengan sesama muslim Tibet, sangat sedikit pernikahan dilakukan diluar komunitas mereka sendiri. Kriteria dalam pernikahan ini hanyalah anak laki-laki harus pekerja keras, lembut, dan religius. Kasta dan kelas tidak begitu memiliki makna dalam pemilihan pengantin wanita dan pria.

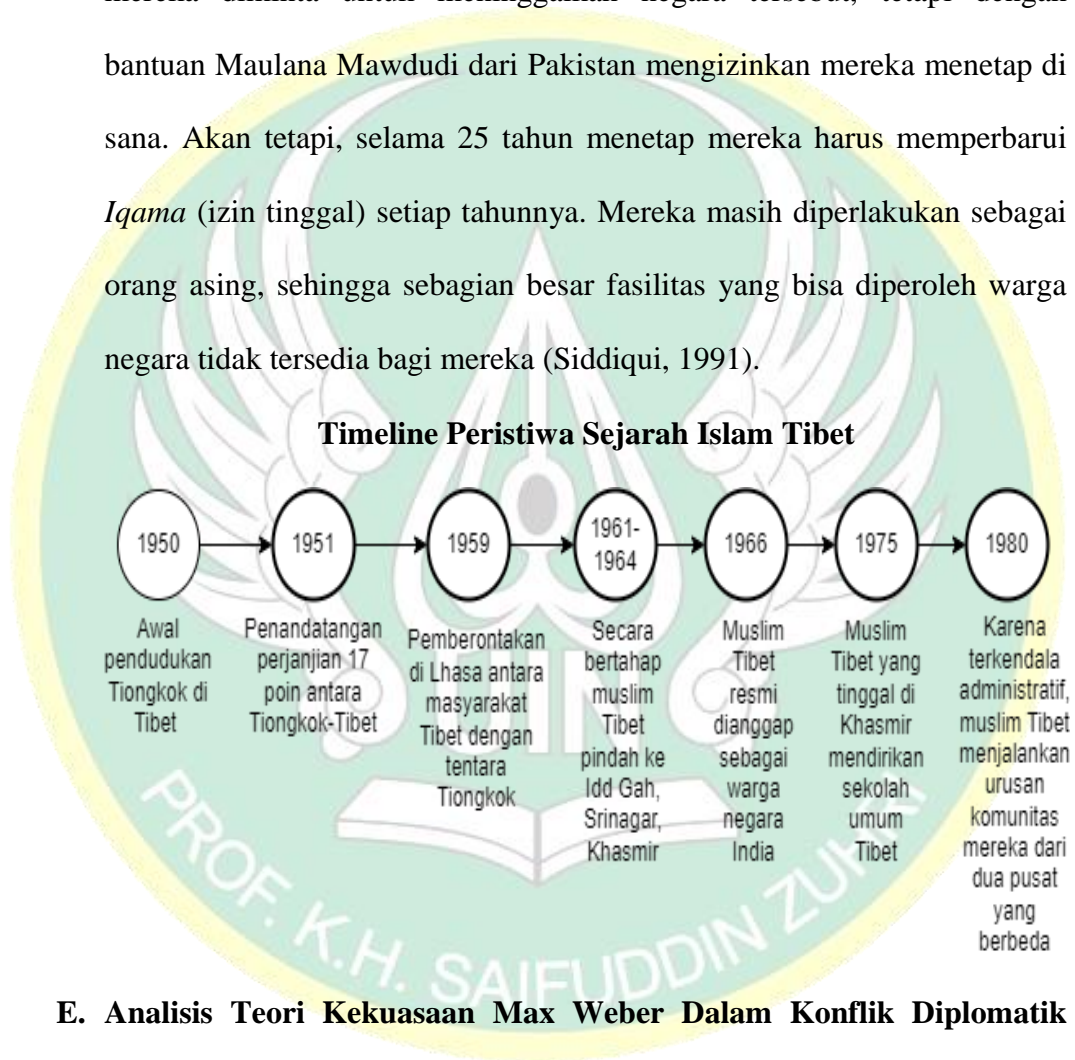
Pernikahan dilakukan dengan cara sederhana yang tetap sesuai dengan agama mereka. Dalam pengaturan pernikahan sebagian besar diatur oleh orang tua, selama berlangsungnya pernikahan itu tiga hidangan disiapkan, juga disajikan yaitu *mazwan* (masakan Khasmir) dengan jumlah terbatas. Warga Khasmir setempat dan teman-teman pengantin diundang untuk ikut merayakan. *Nikkah-khahi* dilakukan di Masjid, pengantin wanita akan ditemani oleh bibi dari pihak ibu dan bibi dari pihak ayah dengan mengenakan gaun pengantin tradisional khusus yang disebut dengan *Chandra*. Tidak ada mas kawin, tidak ada pertukaran emas hanya ada beberapa pakaian yang dijahit dan serangkaian pernikahan pun selesai (Shah, 2012).

Pada tahun 1980, muslim Tibet yang berada di India, karena masalah administratif memutuskan untuk menjalankan urusan mereka dari dua pusat yang berbeda. Muslim Tibet yang berada di Kashmir menjalankan urusan komunitasnya dari Srinagar tetapi muslim Tibet yang berada di Darjeeling, Kalimpong, dan Kathmandu mempunyai komite sendiri untuk menjalankan urusan mereka yang berbasis di Kalimpong. Kedua pusat tersebut memiliki perwakilan dan pengurusnya masing-masing (Siddiqui, 1991).

Kedua pusat tersebut memiliki perwakilan dan pengurusnya masing-masing. Di Kalimpong, mirip dengan Kashmir, mereka membeli sebidang tanah seluas 7,5 hektar dan mereka memiliki rencana untuk mengembangkan sumber daya muslim Tibet dengan membuka usaha

karpet dan tenun. Namun itu semua tergantung pada kondisi keuangan masyarakat.

Muslim Tibet ada beberapa yang tinggal di Timur Tengah, mereka telah diterima sebagai pengungsi khususnya di Arab Saudi. Suatu ketika mereka diminta untuk meninggalkan negara tersebut, tetapi dengan bantuan Maulana Mawdudi dari Pakistan mengizinkan mereka menetap di sana. Akan tetapi, selama 25 tahun menetap mereka harus memperbarui *Iqama* (izin tinggal) setiap tahunnya. Mereka masih diperlakukan sebagai orang asing, sehingga sebagian besar fasilitas yang bisa diperoleh warga negara tidak tersedia bagi mereka (Siddiqui, 1991).



E. Analisis Teori Kekuasaan Max Weber Dalam Konflik Diplomatik

Tiongkok-India

Dalam permasalahan tentang konflik diplomatik Tiongkok-India mengenai kewarganegaraan muslim Tibet, teori kekuasaan Max Weber digunakan untuk memahami bagaimana kedua negara ini menggunakan

otoritas dan kekuasaan mereka untuk menyelesaikan permasalahan kewarganegaraan muslim Tibet. Seperti yang telah dikemukakan oleh Max Weber tentang tiga tipe kekuasaan yaitu kekuasaan tradisional, kekuasaan kharismatik, dan kekuasaan rasional-legal (Dr. Baharuddin, MA, 2021). Tipe-tipe kekuasaan ini selaras dengan permasalahan yang terjadi dan bagaimana pihak Tiongkok juga India menggunakan kekuasaan tersebut.

Pertama, tipe kekuasaan tradisional merupakan orde sosial yang bersandar pada kebiasaan kuno dimana status dan hak para pemimpin juga ditentukan oleh adaptasi kebiasaan (Dr. Baharuddin, MA, 2021). Dalam hal ini, tipe kekuasaan tradisional dapat merujuk pada konteks mengenai Tiongkok yang seringkali menggunakan otoritas tradisional untuk mengklaim wilayah Tibet sebagai bagian dari otonomi Tiongkok berdasarkan sejarahnya. Tiongkok menggunakan legitimasi sejarah untuk menggunakan kontrol atas wilayah Tibet serta masyarakatnya salah satunya muslim Tibet. Namun penggunaan dari kekuasaan tradisional yang dilakukan Tiongkok meskipun mereka merujuk pada sejarah Tibet dengan pemimpin-pemimpin Tiongkok terdahulu akan tetapi klaim tersebut tentu mendapat penolakan dan tantangan dari pihak Tibet yang tidak menerima klaim mengenai wilayah mereka yang menjadi bagian dari otonomi Tiongkok. Hal ini didasarkan oleh Tibet yang merasa bahwa mereka sudah merdeka dan menjadi negara sendiri bukan bagian dari negara lain.

Kedua, tipe kekuasaan kharismatik adalah tipe yang keabsahannya berdasarkan pengakuan terhadap kualitas istimewa dan kesetiaan kepada

individu tertentu serta komunitas bentukannya. Tipe kekuasaan ini terbentuk bukan karena tradisi ataupun legalitas melainkan karena kharisma penguasa itu sendiri (Dr. Baharuddin, MA, 2021). Kekuasaan kharismatik dalam hal ini mengacu pada tokoh-tokoh seperti Dalai Lama yang merupakan pemimpin tertinggi di Tibet dan juga para pemimpin muslim Tibet yang didasarkan pada banyaknya pengikut mereka. Dalai Lama sendiri merupakan tokoh penting di Tibet yang sangat di hormati dari berbagai kalangan terutama oleh muslim Tibet.

Ketiga, tipe kekuasaan rasional-legal yaitu bahwa semua peraturan tertulis dengan jelas dan diundangkan dengan tegas serta batas wewenang para pejabat atau penguasa ditentukan oleh aturan main. Bentuk kekuasaan ini didasarkan pada hukum, peraturan, dan sistem administratif yang jelas (Dr. Baharuddin, MA, 2021). Tiongkok menggunakan kekuasaan rasional-legal untuk merealisasikan visi yang telah mereka rancang. Penggunaan hukum dan kebijakan resmi juga pemerintah Tiongkok gunakan untuk melegitimasi tindakan mereka di Tibet termasuk dalam konflik diplomatik Tiongkok-India mengenai kewarganegaraan muslim Tibet. Tiongkok menerapkan kebijakan kewarganegaraan yang mengharuskan semua warga Tibet termasuk muslim Tibet adalah bagian dari warga negara Tiongkok. Dari sudut pandang Tiongkok, semua muslim di Tibet baik itu Barkor Khache, Wapaling Khache atau muslim dari Beijing yang tinggal di Tibet, semuanya adalah orang Hui dan tanpa kecuali dianggap sebagai warga negara Tiongkok (Atwill, 2018).

Pemerintah Tiongkok dengan kebijakannya mengenai kewarganegaraan, menolak klaim muslim Tibet yang secara historis adalah orang Khasmir. Tiongkok bahkan menganggap upaya muslim Tibet atas pernyataan mereka mengenai asal mereka dari Khasmir sebagai kegiatan penghasutan yang kemudian menangkap dan memenjarakan mereka. Muslim Tibet yang dibantu pemerintah India untuk mendapatkan kewarganegaraan India terus menerus ditolak oleh Tiongkok dengan dalih yang sama yaitu karena muslim Tibet adalah orang Tibet yang tinggal dan tunduk terhadap Dalai Lama maka secara otomatis dianggap sebagai warga negara Tiongkok. Otoritas Tiongkok juga berusaha menghindari pemerintah India dengan terus memaksa muslim Tibet untuk melepas klaim kewarganegaraan India (Singh, 2015).

India yang ikut bersinggungan dalam konflik diplomatik dengan Tiongkok mengenai kewarganegaraan muslim Tibet juga menggunakan hukum dan kebijakan internasional untuk mendukung hak-hak muslim Tibet yang ingin kembali ke negara asli mereka yaitu India. Pemerintah India menggunakan dokumen *White Paper* yang didalamnya membahas mengenai identifikasi tiga kelompok yang tinggal di Tibet pada tahun 1959 yang memenuhi syarat untuk kewarganegaraan India serta penggunaan hukum internasional dan opini internasional untuk menentang pernyataan-pernyataan berulang Tiongkok tentang alasan muslim Tibet adalah bagian dari Tibet dan karenanya mereka juga bagian dari warga

negara Tiongkok. India merasa bahwa Tiongkok menghalangi upaya mereka untuk memecahkan kebuntuan diplomatik mengenai muslim Tibet.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Dinamika sosial pada minoritas muslim Tibet berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dalam hal ini ada beberapa unsur yang mempengaruhi yaitu unsur sosial politik yang terjadi pada Tiongkok-Tibet terutama terjadinya insiden 1959 yang mengakibatkan pendudukan Tiongkok atas Tibet serta tekanan dan pembatasan kebebasan agama bagi muslim Tibet oleh pemerintah Tiongkok dan masalah diplomatik Tiongkok-India menjadi salah satu unsur mengapa minoritas muslim Tibet memiliki permasalahan yang panjang dalam memperoleh hak asasi terutama hak memperoleh kewarganegaraan.

Dampak dari insiden 1959 dan konflik diplomatik Tiongkok-India terutama mengenai klaim kewarganegaraan muslim Tibet mengakibatkan pada satu keputusan yaitu migrasi muslim Tibet ke wilayah Srinagar, Khasmir, India. Keputusan migrasi ini membuat muslim Tibet harus beradaptasi di lingkungan baru dan tinggal ditempat yang kurang memadai dengan fasilitas-fasilitas seadanya. Namun perlahan muslim Tibet mulai membiasakan diri sebagaimana kehidupan orang Khasmir, mereka berusaha berjuang untuk masa depan generasi muda mereka dengan tetap memperhatikan pendidikan bahkan mereka mendirikan kepengurusan

komunitas muslim Tibet untuk menjalankan urusan mereka selama tinggal di Khasmir.

B. Saran

Ada beberapa hal yang sekiranya perlu disampaikan setelah penulis menyelesaikan skripsi ini yaitu:

1. Saran yang ditujukan untuk kalangan akademisi yaitu akademisi UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Program Studi Sejarah Peradaban Islam sebagai kalangan akademisi yang mempelajari sejarah penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan minoritas muslim di Tibet.
2. Saran yang ditujukan kepada instansi pemerintah terkait untuk melihat studi kasus terhadap pengelolaan kaum minoritas diberbagai negara untuk menjadi contoh bagaimana pengelolaan-pengelolaan kaum minoritas yang sesuai. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian ini yang menunjukkan kegagalan pengelolaan kaum minoritas yang kemudian menimbulkan bencana sosial terhadap kaum minoritas tersebut.
3. Saran kepada mahasiswa sejarah, pembahasan tentang minoritas muslim Tibet dalam penelitian ini masih belum banyak yang meneliti sehingga dapat dikaji dan diteliti lebih spesifik dan mendalam. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam kepenulisan sejarah terutama mengenai sejarah muslim Tibet dan konflik Tiongkok-Tibet tahun 1959 oleh mahasiswa program studi Sejarah Peradaban Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, D. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Penerbit Ombak.
- Akasoy Anna, Burnett Charles and Yoeli-Thalim Ronit (eds). (2011). *Islam and Tibet: Interactions Along the Musk Route*. Ashgate Publishing Limited.
- Arnold, T.W. MA. C.I.F. (1913). *The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith*. Second Edition. London: Constable & Company Ltd.
- Atwill, D. G. (2018). Islamic Shangri-La: Inter-Asian Relations and Lhasa's Muslim Communities, 1600 to 1960. In *Islamic Shangri-La: Inter-Asian Relations and Lhasa's Muslim Communities, 1600 to 1960*. <https://doi.org/10.1525/luminos.55>
- Bowman, J. S. (Ed). (2000). *Tibet. In Columbia Chronologies of Asian History and Culture*. Columbia University Press.
- Dr. Baharuddin, MA, (2021). *Pengantar Sosiologi*. Penerbit Sanabil.
- Goldstein, Melvyn C. (1997). *The Snow Lion and The Dragon China, Tibet, and Dalai Lama*. University of California Press.
- Gyatso, Tenzin. (1990). *Freedom in Exile: the autobiography of the Dalai Lama*. HarperCollins Publishers.
- Lopez, Donald S. Jr., (1998). *Prisoners of Shangri-La: Tibetan Buddhism and The West*. Chicago: The University of Chicago Press.
- M. Ali Kettani; Penerjemah, Zarkowi Soejoeti, Ed 1. (2005). *Minoritas Muslim di Dewasa Ini*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Radhu, A. W. (1997). *Islam in Tibet Tibetan Caravans*. Fons Vitae.

Jurnal:

- Aiqani, N. (2018). *Dinamika Konflik China dan Tibet: Pendekatan Perdamaian Demokratis sebagai Upaya Penyelesaian Konflik*.

- Barq, Mushtaque. B. (2013). Locating Tibet, Dalai Lama Lineage and Tibetan Muslims: A Brief Commentary. *The Tibet Journal*, 38(1–2), 69–75.
- Gaborieau, M. (1995). Introduction. *The Tibet Journal*, 20(3), 3-7.
- Gaborieau, M. (1995). Powers and Authority of Sufis Among the Kashmiri Muslims in Tibet. *The Tibet Journal*, 20(3), 21-30.
- Gelek, S. W. (2010). Tibet: The Critical Years. *The Tibet Journal*, 35(4), 63-90.
- Goldstein, M. C. (1998). The Dalai Lama's Dilemma. *Foreign Affairs*, 77(1), 83-97.
- Goldstein, M. C. (2014). The Dalai Lama Visits India. In *A History of Modern Tibet, Volume 3: The Storm Clouds Descend, 1955-1957* (1st ed., pp. 335-382). University of California Press.
- Huseini, S. R. (2013). Medieval Tibet in Perso-Islamic Sources. *Himalayan and Central Asian Studies*, 17(3–4), 251–283.
- Jest, C. (1995). Kha-che and Gya-Kha-che, Muslim Communities in Lhasa (1990). *The Tibet Journal*, 20(3), 8–20.
- Norbu, D. (1997). Tibet in Sino-Indian Relations: The Centrality of Marginality. *Asian Survey*, 37(11).
- Promises and Lies The 17 Point Agreement. (2017). *The Tibet Journal*, 36(1), 27-45..
- Rustamana, A., Pd, M., Mustakimah, D., Fatmala, M., Fahmi, M., Hafiza, I., Ammara, M. F., Sejarah, P., Sultan, U., Tirtayasa, A., Raya, J., No, C., & Banten, S. (n.d.). *DESKRIPSI DAN ANALISIS TENTANG PERANAN SUN YAT SEN DAN JALANNYA REVOLUSI CHINA* (Vol. 2, Issue 2).
- Shah, A. R. (2012). Exploring Ethnicities: A Socio-Cultural profile of Tibetan Community in Indian Khasmir. *The Tibetan Journal*, 37(3), 47-70.
- Sheel, R. N. R. (1989). The Institution of Dalai Lama. *The Tibetan Journal*, 14(3), 19-32.
- Sheikh, A. G. (1991). Tibetan Muslims. *The Tibet Journal*, 16, 86–89.
- Siddiqui, A. (1991). Muslims of Tibet. *The Tibet Journal*, 16, 71–85.

Singh, Rohit. (2015). Reimagining Tibet Through the Lens of Tibetan Muslim History and Identity. *Oxford Handbooks Online*.
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199935420.013.7>

Stocks, N. (2016). 濟無 *No Title No Title No Title*.

Tsering Topgyal. (2013). Identity Insecurity and the Tibetan Resistance Against China. *Pacific Affairs*, 86(3), 515-538.

Yola, N., Imam, U., & Padang, B. (2021). Minoritas Muslim Tibet Di Tengah Komunitas Budha. In *Jurnal Penelitian & Pengabdian* (Vol. 9, Issue 1).
<https://travel.detik.com/fototravel/d->

Skripsi/Tesis:

Gaute, A. (2015). The role of religion in migrant and diaspora experience Muslim och Tibetan Religionens betydelse för migranter i diaspora. *Universitet Karlstads*.

Kurnianingrum, F. (2015). Dalai Lama Xiv Di Arena Politik Tibet Pada Tahun 1950-1960 Dalai Lama Xiv in the Political Arena in Tibet in 1950-1960. *Universitas Negeri Yogyakarta*.

Oleh, D. (2010). Garis Besar Sejarah China Era Mao *Universitas Negeri Yogyakarta*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

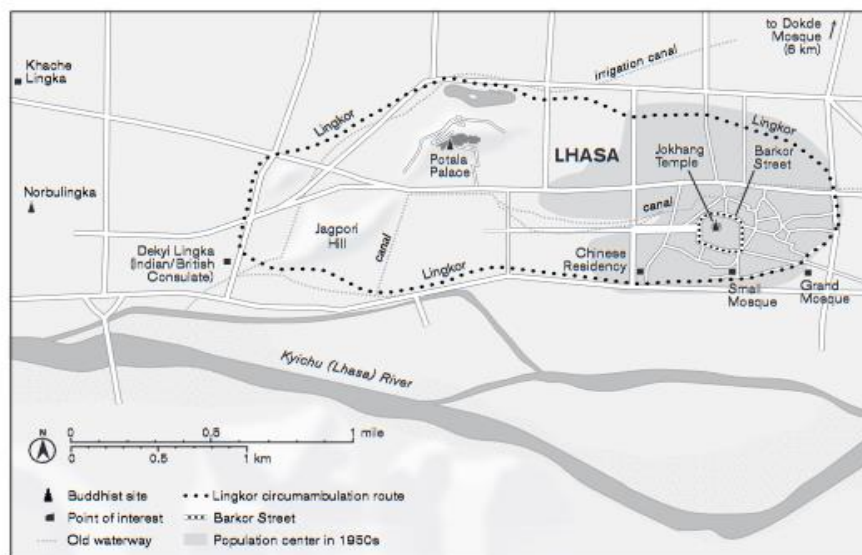
Lampiran 1

Gambar 1. Peta Provinsi di Tibet



Sumber : <https://freetibet.org/freedom-for-tibet/history-of-tibet/where-is-tibet/>

Gambar 2. Peta ibukota Lhasa

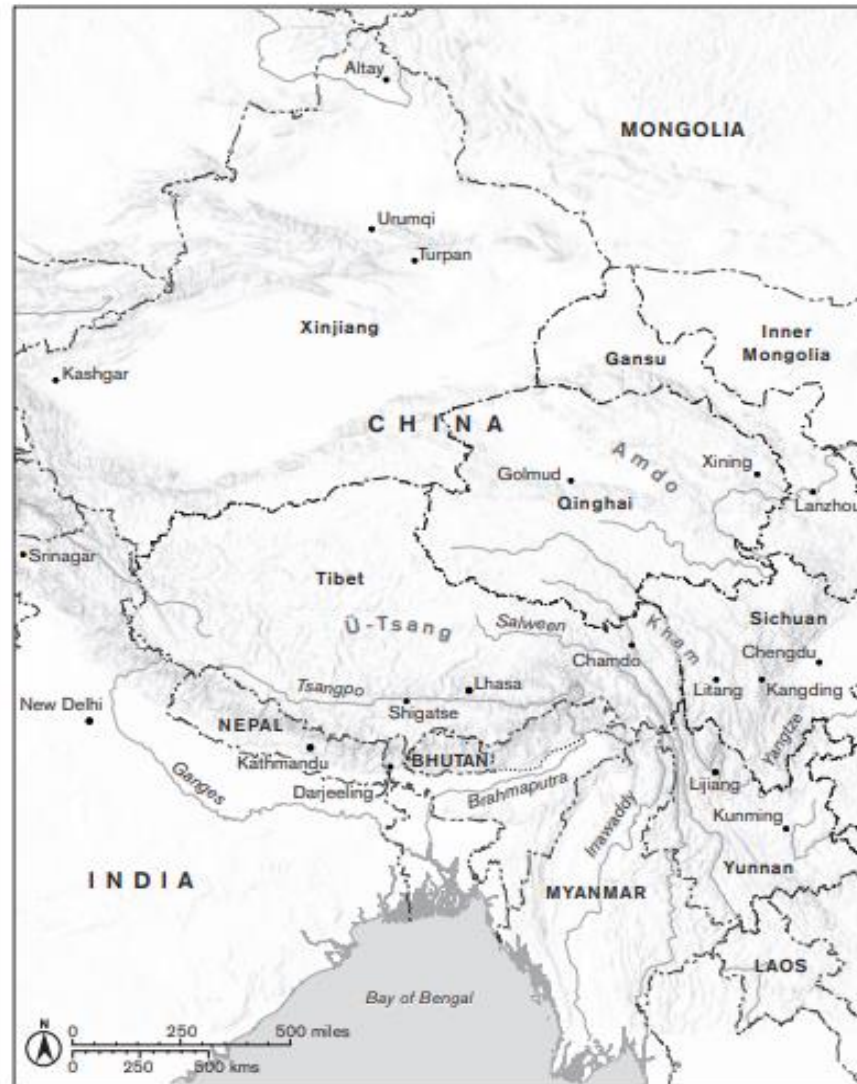


MAP 2. Lhasa, ca. 1950

Sumber : (Atwill, 2018)

Lampiran 2

Gambar 3. Peta Tibet



MAP 1. Tibet in Asia with current international boundaries

Sumber : (Atwill, 2018)

Lampiran 3

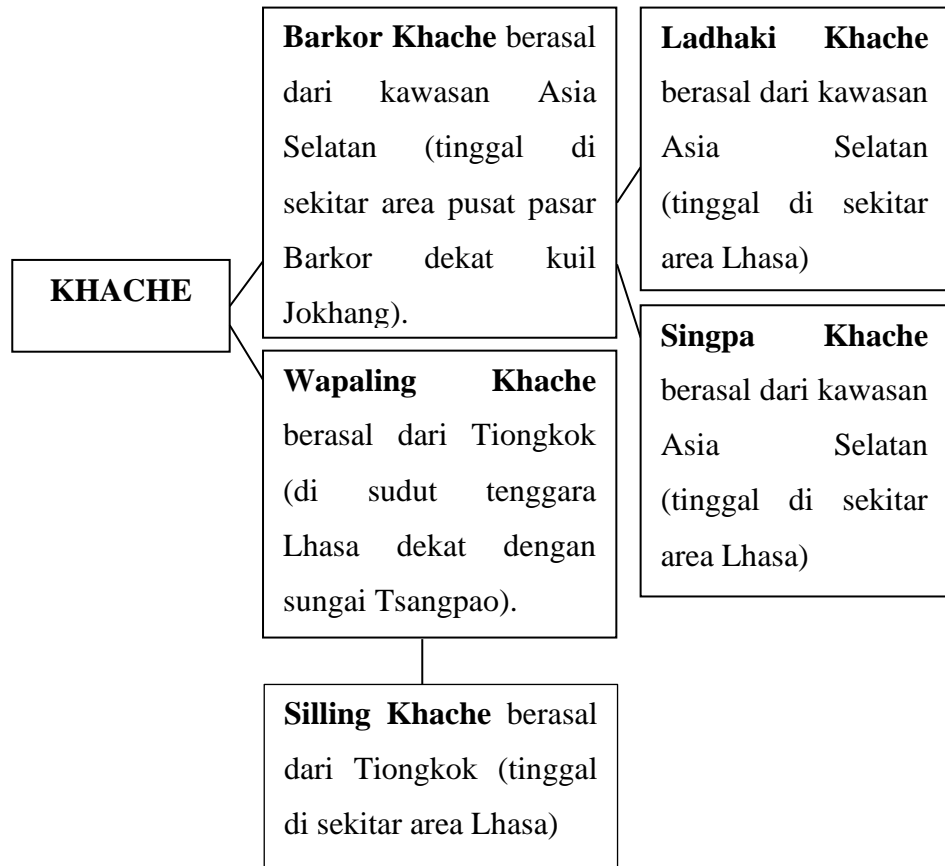
Tabel 1. 1 Daftar Dalai Lama

No	Nama	Tahun Dilantik
1.	Gedun Drupa	1416
2.	Gedun Gyatso	1486
3.	Sonam Gyatso	1565
4.	Yonten Gyatso	1614
5.	Ngawang Lobsang Gyatso	1642
6.	Tsangyang Gyatso	1697
7.	Kelsang Gyatso	1751
8.	Jamphel Gyatso	1781
9.	Lungtok Gyatso	1810
10.	Tsultrim Gyatso	1831
11.	Khedrup Gyatso	1849
12.	Thinley Gyatso	1860
13.	Thupten Gyatso	1895
14.	Tenzin Gyatso	1950

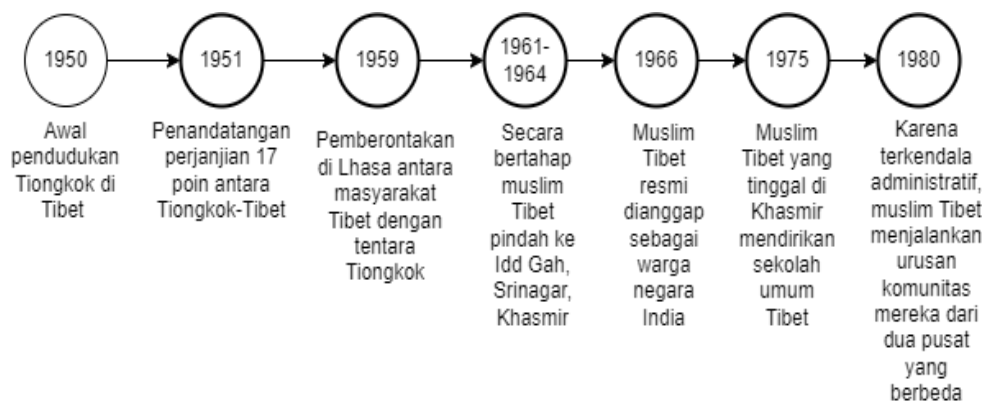
Sumber: <https://namgyal.org/pages/dalailamas>

Lampiran 4

Bagan Komunitas Muslim Khache



Timeline Peristiwa Sejarah Islam Tibet



Lampiran 5: Surat keterangan lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinszu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL
Nomor : B.719/Un.19/FUAH/PP.05.3/4/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Hasnawati
NIM : 2017503058
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Sejarah Peradaban Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul : Dinamika Sosial Minoritas Muslim Tibet Dalam Konflik Diplomatik Tiongkok-India (1959-1980)

Pada Hari Selasa, tanggal 2 April 2024 dan dinyatakan **LULUS** dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. LBM : aspek kronologis perlu ditonjolkan. Peristiwa pada pembahasan tempat dan waktu. Posisi Tibet dalam pemerintahan China.
2. Konsistensi penulisan. Sistematika pembahasan. Penggunaan teori dan pendekatan dalam menjabarkan proposal skripsi
- 3.
- 4.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Pembimbing, Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 3 April 2024
Penguji,

Fitri Sari Setyorini, M.Hum

Jamaluddin, M.A

Lampiran 6: Surat keterangan lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 website: www.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF
NOMOR: B-791/Un.19/WD.I/FUAH/PP.06.1/7/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Hasnawati
NIM : 2017503058
Fak/Prodi : FUAH/ Sejarah Peradaban Islam
Semester : 8
Tahun Masuk : 2020

Mahasiswa tersebut benar-benar telah menyelesaikan Ujian Komprehensif Program Sejarah Peradaban Islam pada Tanggal 5 Juli 2024: **Lulus dengan Nilai: 82,5 (A-)**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 9 Juli 2024



Wakil Dekan I Bidang Akademik

Prof. Dr. Kholid Mawardi, M.Hum
NIP. 197402281999031005

Lampiran 7: Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN
NPP: 3302272F1000001

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-5272/Un.19/K.Pus/PP.08.1/11/2024

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : HASNAWATI
NIM : 2017503058
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora (FUAH) / Sejarah Peradaban Islam

Telah menyumbangkan (menghibahkan) buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Judul, Pengarang, Tahun dan Penerbit ditentukan dan atau disetujui oleh Kepala Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 4 November 2024



Kepala,
Indah Wijaya Antasari

Lampiran 8: Blangko bimbingan skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hashwaedi
 NIM : 2017503058
 Jurusan/Prodi : SPI
 Judul : Dinamika Sosial Minoritas Muslim Tikok Dalam konflik Diplomatik Trisigko-India (1959-1960)


: No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	
			Pembimbing	Mahasiswa
1	Selasa, 24 Sep 2024	Revisi bab I, landasan teori		
2	Jumat, 27 Sep 2024	Revisi bab I, Batasan dan rumusan masalah		
3	Senin, 30 Sep 2024	Revisi judul sub bab 2		
4	Jumat, 4 Okt 2024	Revisi bab 1 dan bab 2		
5	Senin, 7 Okt 2024	Revisi bab 2 dan bab 3		
6	Senin, 14 Okt 2024	Revisi bab 3 dan daftar pustaka		
7	Senin, 21 Okt 2024	Revisi no halaman, spasi judul per bab bimbingan		
8	Kamis, 24 Okt 2024	Acc Munqasyah		

*) Diisi sesuai jumlah bimbingan skripsi sampai Acc untuk dimunaqasyahkan

Dibuat di : Purwokerto,
 Tanggal :
 Dosen Pembimbing

 FITRI SAKI S. M. HUM.

Lampiran 9: Surat Rekomendasi Munaqosyah

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Hasnawati
NIM : 2017503058
Jurusan/Prodi : Sejarah Peradaban Islam
Angkatan Tahun : 2020
Judul Proposal Skripsi : Dinamika Sosial Minoritas Muslim Tibet Dalam Konflik Diplomatik Tiongkok-India (1959-1980)

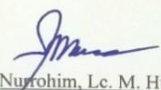
Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk di munaqosyah kan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

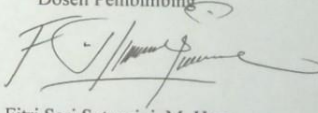
Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal: 24 Oktober2024

Mengetahui,
Koordinator Program Studi SPI


Nurrohm, L.e. M. Hum.
NIP. 198709022019031011

Dosen Pembimbing


Fitri Sari Setyorini, M. Hum.
NIP. 198907032023212036

Lampiran 10: Surat Keterangan Cek Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : **B-223/Un.19/Kalab.FUAH/PP.08.2/10/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sidik Fauji, M. Hum.
NIP : 199201242018011002
Jabatan : Kepala Laboratorium FUAH

Menerangkan bahwa, mahasiswa kami :

Nama : HASNAWATI
NIM : 2017503058
Prodi : SPI

Judul Skripsi : DINAMIKA SOSIAL MINORITAS MUSLIM TIBET DALAM
KONFLIK DIPLOMATIK TIONGKOK-INDIA (1959-1980)

Dengan ini menerangkan mahasiswa tersebut melakukan cek plagiasi terhadap skripsi pada tanggal **22 Oktober 2024** melalui *turnitin* dengan hasil kesamaan keseluruhan ialah **12 %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 22 Oktober 2024

Kalab FUAH,

Sidik Fauji, M. Hum.
NIP. 199201242018011002

Lampiran 11: Sertifikat

a. Sertifikat BTA/PPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.uinsaizu.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: Un.17/UPT.MAJ/1328/02/2023

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri kepada:

HASNAWATI
(NIM: 2017503058)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

Tulis	: 93
Tartil	: 70
Imla'	: 75
Praktek	: 70
Tahfidz	: 72



ValidationCode

b. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنديرال احمد ياتي رقم: ٤٠. أ. بوروكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٢٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢١/٢٥٨١٤

منحت الى	
الاسم	: حسنى واتي
المولودة	: بوونوسويو، ١٠ مارس ٢٠٠١
	الذي حصل على
	فهم المسموع
	فهم العبارات والتراكيب
	فهم المقروء
	النتيجة
	٤٥١ :



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١٦ مايو ٢٠٢١

بوروكرتو، ٢٧ يوليو ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode

c. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)
Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/25814/2020

This is to certify that

Name : HASNAWATI
Date of Birth : WONOSOBO, March 10th, 2001

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on September 8th, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 49
2. Structure and Written Expression : 44
3. Reading Comprehension : 50

Obtained Score : 476



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



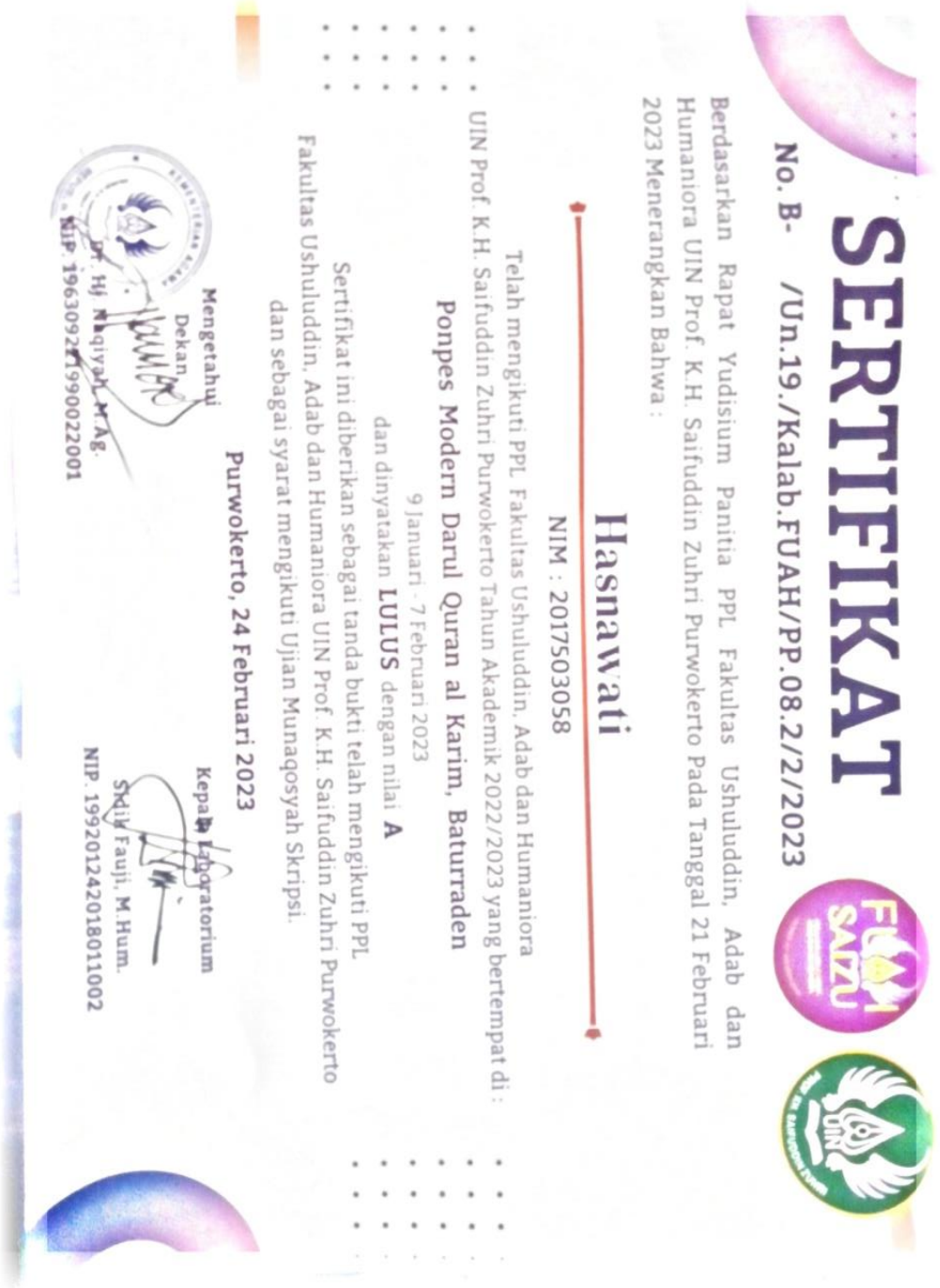
ValidationCode



Purwokerto, September 19th, 2020
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid
H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

d. Sertifikat PPL



SERTIFIKAT

No. B- /Un.19./Kalab.FUAH/PP.08.2/2/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Pada Tanggal 21 Februari 2023 Menerangkan Bahwa :

Hasnawati

NIM : 2017503058

Telah mengikuti PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Akademik 2022/2023 yang bertempat di :

Ponpes Modern Darul Quran al Karim, Baturraden

9 Januari - 7 Februari 2023




dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti Ujian Munagasyah Skripsi.

Purwokerto, 24 Februari 2023

Mengetahui
Dekan
Prof. Hj. M. Iqiyah, S.Pd, Ag.
NIP. 196309271990022001

Kepala Laboratorium
Sidiq Fauji, M. Hum.
NIP. 199201242018011002



e. Sertifikat KKN



The certificate features a decorative header with green and yellow wavy shapes. In the top right corner, there are three logos: the UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri logo, the LPPM logo with the tagline 'Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat', and the KAMPUS logo. The main title 'Sertifikat' is prominently displayed in a large green font. Below it, the certificate number '0069/K.LPPM/KKN.52/09/2023' is provided. The issuing institution is identified as 'Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto'. The recipient's name 'HASNAWATI' and NIM '2017503058' are listed. The text states that the student has completed the KKN program for the 2024 cohort and has passed with a grade of 90 (A). A red-bordered photo of the student and a QR code for validation are included at the bottom.

 |  **LPPM** 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0069/K.LPPM/KKN.52/09/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **HASNAWATI**
NIM : **2017503058**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-52 Tahun 2024,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **90 (A)**.



Certificate Validation

Lampiran 12

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Hasnawati
2. NIM : 2017503058
3. Tempat/Tgl. Lahir : Wonosobo, 10 Maret 2001
4. Alamat Rumah : Dsn. Kalijanggal RT01/RW 01, Desa Lancar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo.
5. Nama Ayah : Ahmad Saeful
6. Nama Ibu : Sumiati


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 2 Lancar, lulus 2013
 - b. SMPN 1 Mojotengah, lulus 2016
 - c. SMKN 1 Wonosobo, lulus 2019
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuaran

C. Pengalaman Organisasi

1. HMPS Sejarah Peradaban Islam periode tahun 2022/2023

Purwokerto, 24 Oktober 2024



Hasnawati
NIM 2017503058